



SALINAN

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 07 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan obyektif, nyata dan sesuai karakteristik daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu mengembangkan kode rekening perencanaan dan penganggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
29. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 2

Uraian susunan kode rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Pasal 3

Uraian mengenai Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Kode dan Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang;
- b. Lampiran II Kode Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Urusan Yang Dilaksanakan;
- c. Lampiran III Kode Akun Pendapatan, Kode Akun Belanja Dan Kode Akun Pembiayaan merupakan bagian susunan Kode Akun Keuangan Daerah;
- d. Lampiran IV Kode Rekening Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V Kode Dan Klasifikasi Fungsi;
- f. Lampiran VI Kode Dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VII Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Lampiran VIII Kode Rekening Belanja Daerah;
- i. Lampiran IX Kode Rekening Pembiayaan Daerah

Pasal 4

Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2012.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 32);
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 99);
3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 10); dan

4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 25); dan tetap berlaku untuk proses perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dimulainya perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 28 - 06 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 67

Lampiran I Peraturan Bupati Semarang
 Nomor : 67 Tahun 2011
 Tanggal : 28 - 06 - 2011

**KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DI KABUPATEN SEMARANG**

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1			URUSAN WAJIB
1	01		PENDIDIKAN
1	01	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN
1	02		KESEHATAN
1	02	1.02.01	DINAS KESEHATAN
1	02	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA
1	02	1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN
1	02	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	03		PEKERJAAN UMUM
1	03	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	04		PERUMAHAN
1	04	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	04	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	05		PENATAAN RUANG
1	05	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	05	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	05	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	06		PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1	06	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	06	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	07		PERHUBUNGAN
1	07	01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	08		LINGKUNGAN HIDUP
1	08	1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1	08	1.04.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	09		PERTANAHAN
1	09	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	09	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	10		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1	10	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	11		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	11	1.11.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1	11	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	12		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1	12	1.11.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1	13		SOSIAL
1	13	1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1	13	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	14		TENAGA KERJA
1	14	1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1	15		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1	15	1.15.01	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	16		PENANAMAN MODAL DAERAH
1	16	1.16.01	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
1	17		KEBUDAYAAN
1	17	1.17.01	DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	18		PEMUDA DAN OLAH RAGA
1	18	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	18	1.17.01	DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	18	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	18	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	19		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1	19	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	19	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	19	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	20		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1	20	1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
1	20	1.20.02	BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	20	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	20	1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1	20	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	20	1.20.06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1	20	1.20.07	INSPEKTORAT
1	20	1.20.08	KECAMATAN
		1.20.08.01	KECAMATAN GETASAN
		1.20.08.02	KECAMATAN TENGARAN
		1.20.08.03	KECAMATAN SUSUKAN
		1.20.08.04	KECAMATAN SURUH
		1.20.08.05	KECAMATAN PABELAN
		1.20.08.06	KECAMATAN TUNTANG
		1.20.08.07	KECAMATAN BANYUBIRU
		1.20.08.08	KECAMATAN JAMBU
		1.20.08.09	KECAMATAN SUMOWONO
		1.20.08.10	KECAMATAN AMBARAWA
		1.20.08.11	KECAMATAN BAWEN
		1.20.08.12	KECAMATAN BRINGIN
		1.20.08.13	KECAMATAN BERGAS
		1.20.08.14	KECAMATAN PRINGAPUS
		1.20.08.15	KECAMATAN BANCAK
		1.20.08.16	KECAMATAN KALIWUNGU
		1.20.08.17	KECAMATAN UNGARAN BARAT
		1.20.08.18	KECAMATAN UNGARAN TIMUR
		1.20.08.19	KECAMATAN BANDUNGAN
1	20	1.20.09	KELURAHAN
		1.20.09.01	KELURAHAN GONDORIYO
		1.20.09.02	KELURAHAN NGAMPIN
		1.20.09.03	KELURAHAN POJOKSARI
		1.20.09.04	KELURAHAN TAMBAKBOYO
		1.20.09.05	KELURAHAN LODOYONG
		1.20.09.06	KELURAHAN KUPANG
		1.20.09.07	KELURAHAN KRANGGAN
		1.20.09.08	KELURAHAN PANJANG
		1.20.09.09	KELURAHAN BARAN
		1.20.09.10	KELURAHAN BANDUNGAN
		1.20.09.11	KELURAHAN BAWEN
		1.20.09.12	KELURAHAN HARJOSARI
		1.20.09.13	KELURAHAN NGEMPON
		1.20.09.14	KELURAHAN KARANGJATI
		1.20.09.15	KELURAHAN WUJIL
		1.20.09.16	KELURAHAN BERGAS LOR
		1.20.09.17	KELURAHAN PRINGAPUS
		1.20.09.18	KELURAHAN CANDIREJO

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
		1.20.09.19	KELURAHAN GENUK
		1.20.09.20	KELURAHAN UNGARAN
		1.20.09.21	KELURAHAN BANDARJO
		1.20.09.22	KELURAHAN LANGENSARI
		1.20.09.23	KELURAHAN SIDOMULYO
		1.20.09.24	KELURAHAN KALIREJO
		1.20.09.25	KELURAHAN SUSUKAN
		1.20.09.26	KELURAHAN GEDANG ANAK
		1.20.09.27	KELURAHAN BEJI
1	20	1.20.10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	20	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	21		KETAHANAN PANGAN
1	21	1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN
1	21	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	22		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	22	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	23		STATISTIK
1	23	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	24		KEARSIPAN
1	24	1.24.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1	24	1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1	25		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	25	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	25	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
1	25	1.20.04	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1	26		PERPUSTAKAAN
1	26	1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2			URUSAN PILIHAN
2	01		PERTANIAN
2	01	2.01.01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
2	01	2.01.02	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	01	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH
2	01	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	02		KEHUTANAN
2	02	2.01.01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	03	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2	03	1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM
2	04	PARIWISATA
2	04	1.17.01 DINAS PEMUDA ,OLAH RAGA,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	05	KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	05	2.01.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	06	PERDAGANGAN
2	06	2.07.01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	06	1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
2	07	PERINDUSTRIAN
2	07	2.07.01 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	07	1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
2	08	TRANSMIGRASI
2	08	1.14.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



Lampiran II Peraturan Bupati Semarang
 Nomor : 67 Tahun 2011
 Tanggal : 28-06-2011

**KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN YANG
 DILAKSANAKAN**

KODE			SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KODE		URUSAN
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN	1	01	Pendidikan
				1	18	Kepemudaan dan Olah Raga
1	02	01	DINAS KESEHATAN	1	02	Kesehatan
1	02	01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA	1	02	Kesehatan
1	02	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN	1	02	Kesehatan
1	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM	1	03	Pekerjaan Umum
				1	04	Perumahan
				1	05	Penataan Ruang
				1	08	Lingkungan Hidup
				1	18	Pemuda dan Olah Raga
				2	03	Energi dan Sumber Daya Mineral
1	06	01	BAPPEDA	1	03	Pekerjaan Umum
				1	04	Perumahan
				1	05	Penataan Ruang
				1	06	Perencanaan Pembangunan
				1	23	Statistik
				2	01	Pertanian
1	07	01	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	07	Perhubungan
				1	25	Komunikasi dan Informatika
1	08	01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1	08	Lingkungan Hidup
1	10	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil
1	11	01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1	14	01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	13	Sosial
				1	14	Ketenagakerjaan
				2	08	Transmigrasi
1	15	01	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				2	06	Perdagangan
				2	07	Perindustrian
1	16	01	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	1	16	Penanaman Modal

KODE			SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KODE	URUSAN
1	17	01	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1 17	Kebudayaan
				1 18	Pemuda dan Olah Raga
				2 04	Pariwisata
1	19	01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	19	02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1	20	01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	02	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	1 20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	03	SEKRETARIAT DAERAH	1 02	Kesehatan
				1 03	Pekerjaan Umum
				1 05	Penataan Ruang
				1 06	Perencanaan Pembangunan
				1 09	Pertanahan
				1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				1 13	Sosial
				1 15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				1 18	Pemuda dan Olah Raga
				1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
				1 20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
				1 21	Ketahanan Pangan
				1 25	Komunikasi dan Informatika
				2 01	Pertanian
				2 06	Perdagangan
				2 07	Perindustrian
1	20	04	SEKRETARIAT DPRD	1 20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
				1 24	Kearsipan
				1 25	Komunikasi dan Informatika
1	20	05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 09	Pertanahan
				1 18	Pemuda dan Olah Raga
				1 20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

KODE			SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KODE		URUSAN
1	20	06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	07	INSPEKTORAT	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.01	KECAMATAN GETASAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.02	KECAMATAN TENGARAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.03	KECAMATAN SUSUKAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.04	KECAMATAN SURUH	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.05	KECAMATAN PABELAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.06	KECAMATAN TUNTANG	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.07	KECAMATAN BANYUBIRU	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.08	KECAMATAN JAMBU	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.09	KECAMATAN SUMOWONO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.10	KECAMATAN AMBARAWA	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.11	KECAMATAN BAWEN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.12	KECAMATAN BRINGIN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

KODE			SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KODE		URUSAN
1	20	08.13	KECAMATAN BERGAS	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.14	KECAMATAN PRINGAPUS	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.15	KECAMATAN BANCAK	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.16	KECAMATAN KALIWUNGU	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.17	KECAMATAN UNGARAN BARAT	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.18	KECAMATAN UNGARAN TIMUR	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	08.19	KECAMATAN BANDUNGAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.01	KELURAHAN GONDORIYO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.02	KELURAHAN NGAMPIN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.03	KELURAHAN POJOKSARI	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.04	KELURAHAN TAMBAKBOYO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.05	KELURAHAN LODOYONG	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.06	KELURAHAN KUPANG	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.07	KELURAHAN KRANGGAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

KODE			SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KODE		URUSAN
1	20	09.08	KELURAHAN PANJANG	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.09	KELURAHAN BARAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.10	KELURAHAN BANDUNGAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.11	KELURAHAN BAWEN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.12	KELURAHAN HARJOSARI	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.13	KELURAHAN NGEMPON	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.14	KELURAHAN KARANGJATI	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.15	KELURAHAN WUJIL	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.16	KELURAHAN BERGAS LOR	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.17	KELURAHAN PRINGAPUS	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.18	KELURAHAN CANDIREJO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.19	KELURAHAN GENUK	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.20	KELURAHAN UNGARAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.21	KELURAHAN BANDARJO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

KODE			SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KODE		URUSAN
1	20	09.22	KELURAHAN LANGENSARI	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.23	KELURAHAN SIDOMULYO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.24	KELURAHAN KALIREJO	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.25	KELURAHAN SUSUKAN	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.26	KELURAHAN GEDANG ANAK	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	09.27	KELURAHAN BEJI	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	20	10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
1	21	01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	1	21	Ketahanan Pangan
1	22	01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
				1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	26	01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1	24	Kearsipan
				1	26	Perpustakaan
2	01	01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	2	01	Pertanian
				2	02	Kehutanan
2	01	02	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2	01	Pertanian
				2	05	Kelautan dan Perikanan



Lampiran III Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 67 Tahun 2011
Tanggal : 28-06 2011

SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DAERAH

KODE	URAIAN
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan



KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH

Kode	Uraian
1	2
4.	PENDAPATAN DAERAH
4.1.	Pendapatan Asli Daerah
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah
4.1.1.01.	Pajak Hotel
4.1.1.01.01.	Hotel Bintang Lima Berlian
4.1.1.01.02.	Hotel Bintang Lima
4.1.1.01.03.	Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.04.	Hotel Bintang Tiga
4.1.1.01.05.	Hotel Bintang Dua
4.1.1.01.06.	Hotel Bintang Satu
4.1.1.01.07.	Hotel Melati Tiga
4.1.1.01.08.	Hotel Melati Dua
4.1.1.01.09.	Hotel Melati Satu
4.1.1.01.10.	Motel
4.1.1.01.11.	Cottage
4.1.1.01.12.	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos (Pondok Wisata)
4.1.1.01.13.	Wisma Pariwisata
4.1.1.02.	Pajak Restoran
4.1.1.02.01.	Restoran
4.1.1.02.02.	Rumah Makan
4.1.1.02.03.	Café
4.1.1.02.04.	Kantin
4.1.1.02.05.	Katering
4.1.1.03.	Pajak Hiburan
4.1.1.03.01.	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.03.02.	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana (Pertunjukan/Tontonan)
4.1.1.03.03.	Kontes Kecantikan
4.1.1.03.04.	Kontes Binaraga
4.1.1.03.05.	Pameran
4.1.1.03.06.	Diskotik
4.1.1.03.07.	Karaoke
4.1.1.03.08.	Klub Malam
4.1.1.03.09.	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.03.10.	Permainan Biliar
4.1.1.03.11.	Permainan Golf
4.1.1.03.12.	Permainan Bowling
4.1.1.03.13.	Pacuan Kuda (Perlombaan Binatang)
4.1.1.03.14.	Balap Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.15.	Permainan Ketangkasan
4.1.1.03.16.	Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17.	Mandi Uap/Spa
4.1.1.03.18.	Pusat Kebugaran
4.1.1.03.19.	Pertandingan Olahraga
4.1.1.03.20.	Persewaan Kereta Wisata
4.1.1.03.21.	Persewaan VCD/LCD
4.1.1.03.22.	Video Game/Permainan Elektronik
4.1.1.03.23.	Tempat Permainan Anak-anak
4.1.1.03.24.	Tempat Permandian
4.1.1.03.25.	Tempat Rekreasi
4.1.1.03.26.	Tempat Pemancingan

Kode	Uraian
1	2
4.1.1.03.27.	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga
4.1.1.03.28.	Hiburan Lainnya
4.1.1.04.	Pajak Reklame
4.1.1.04.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4.1.1.04.02.	Reklame Kain
4.1.1.04.03.	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.04.04.	Reklame Selebaran
4.1.1.04.05.	Reklame Berjalan Termasuk Reklame Kendaraan
4.1.1.04.06.	Reklame Udara
4.1.1.04.07.	Reklame Apung
4.1.1.04.08.	Reklame Suara
4.1.1.04.09.	Reklame Film/Slide
4.1.1.04.10.	Reklame Peragaan
4.1.1.04.11.	Reklame Megatron
4.1.1.04.12.	Reklame Papan Nama
4.1.1.04.13.	Reklame Baliho
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.05.01.	Pajak Penerangan Jalan PLN
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
4.1.1.06.01.	Andesit
4.1.1.06.02.	Bentonit
4.1.1.06.03.	Gamping
4.1.1.06.04.	Truss
4.1.1.06.05.	Keolin
4.1.1.06.06.	Pasir Urug
4.1.1.06.07.	Pasir
4.1.1.06.08.	Tanah Urug
4.1.1.06.09.	Tanah Liat
4.1.1.06.10.	Kerikil
4.1.1.07.	Pajak Parkir
4.1.1.07.01.	Pajak Parkir
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah
4.1.1.08.01.	Pajak Air Tanah.
4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.09.01.	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.10.	Pendapatan Pajak BPHTB
4.1.1.10.01.	Pajak BPHTB
4.1.1.10.02.	-
4.1.1.11.	Pendapatan Piutang Pajak Daerah
4.1.1.11.01.	Pendapatan Piutang Pajak Hotel
4.1.1.11.02.	Pendapatan Piutang Pajak Restoran / Rumah Makan
4.1.1.11.03.	Pendapatan Piutang Pajak Hiburan
4.1.1.11.04.	Pendapatan Piutang Pajak Reklame
4.1.1.11.05.	Pendapatan Piutang Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.11.06.	Pendapatan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
4.1.1.11.07.	Pendapatan Piutang Pajak Parkir
4.1.1.11.08.	Pendapatan Piutang Pajak BPHTB
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.01.01.	Rekam Medis
4.1.2.01.01.02.	Tindakan/Operasi

Kode	Uraian
1	2
4.1.2.01.01.03.	Rawat Jalan
4.1.2.01.01.04.	Rawat Inap Umum/Perawatan
4.1.2.01.01.05.	Rawat Inap Kusta
4.1.2.01.01.06.	Obat-obatan
4.1.2.01.01.07.	PHB/Askes
4.1.2.01.01.08.	Laboratorium
4.1.2.01.01.09.	Radiologi/Rontgen
4.1.2.01.01.10.	Ambulance
4.1.2.01.01.11.	Diklat
4.1.2.01.01.12.	Jasa Konsultasi Medik (Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medis)
4.1.2.01.01.13.	Kartu Rekam Medis
4.1.2.01.01.14.	Sewa VK
4.1.2.01.01.15.	Tindakan Khusus
4.1.2.01.01.16.	Keur Uji Kesehatan
4.1.2.01.01.17.	Oksigen/O2
4.1.2.01.01.18.	Jasa Sarana
4.1.2.01.01.19.	USG
4.1.2.01.01.20.	EKG
4.1.2.01.01.21.	Sewa Kamar Jenasah
4.1.2.01.01.22.	Persalinan
4.1.2.01.01.23.	Anestesi
4.1.2.01.01.24.	Visite
4.1.2.01.01.25.	Asuhan Keperawatan
4.1.2.01.01.26.	Linen
4.1.2.01.01.27.	Tindakan Penunjang Lainnya
4.1.2.01.01.28.	Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
4.1.2.01.01.29.	Ijin Laik Sehat
4.1.2.01.01.30.	Pelayanan IGD
4.1.2.01.01.31.	Pelayanan Visum et repertum
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.02.01.	Retribusi Pelayanan Sampah Rumah Tangga
4.1.2.01.02.02.	Retribusi Pelayanan Sampah Perusahaan
4.1.2.01.02.03.	Retribusi Pelayanan Sampah Perkantoran
4.1.2.01.02.04.	Retribusi Pelayanan Sampah Rumah Makan
4.1.2.01.02.05.	Retribusi Pelayanan Sampah Pasar
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4.1.2.01.03.01.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga
4.1.2.01.03.02.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
4.1.2.01.03.03.	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)
4.1.2.01.03.04.	Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
4.1.2.01.03.05.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
4.1.2.01.03.06.	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
4.1.2.01.03.07.	Jasa Pelayanan Catatan Sipil
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.04.01.	Retribusi Pelayanan Pemakaman
4.1.2.01.04.02.	Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.01.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.01.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.01.10.	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.01.11.	Retribusi Mobil Derek

Kode	Uraian
1	2
4.1.2.01.12.	Retribusi Pelayanan Pasar Jetis
4.1.2.01.13.	Retribusi Pelayanan Pasar Hewan
4.1.2.01.17.	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.01.18.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.01.	Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.02.01.01.	Retribusi Sewa Tanah & Bangunan (al: sewa kios)
4.1.2.02.01.02.	Peralatan Konstruksi dan Pembangunan (al: Sewa Alat-alat Berat)
4.1.2.02.01.03.	Sewa Rumah Dinas
4.1.2.02.01.04.	Sewa Lapangan Olah Raga
4.1.2.02.01.05.	Sewa Gedung, Aula, Ruangan dan Asrama
4.1.2.02.01.06.	Sewa Laboratorium (al: Laboratorium Pemeriksaan Air Susu)
4.1.2.02.01.07.	Sewa Lahan (Tanah, Tambak & Sejenisnya)
4.1.2.02.01.08.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
4.1.2.02.01.09.	Retribusi Timbangan Ternak
4.1.2.02.01.10.	Retribusi Jasa Usaha Suara Serasi
4.1.2.02.01.11.	Retribusi Jasa Laboratorium Bangunan Sipil
4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.02.07.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.02.10.01.	Gedong Songo
4.1.2.02.10.02.	Pemandian Muncul
4.1.2.02.10.03.	Bukit Cinta Brawijaya
4.1.2.02.10.04.	Musium Palagan
4.1.2.02.10.05.	Musium Kereta Api
4.1.2.02.10.06.	Wana Wisata Penggaron
4.1.2.02.10.07.	Wana Wisata Air Terjun Semirang
4.1.2.02.10.08.	Wana Wisata Umbul Songo
4.1.2.02.10.09.	Langen Tirto Muncul
4.1.2.02.11.	Retribusi Penyeberangan di Air
4.1.2.02.12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.02.13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.14.	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk Bibit
4.1.2.02.15.	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk Benih Ikan
4.1.2.02.16.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Obyek Wisata The Fountain Water Park
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.2.03.06.	Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Peneng
4.1.2.03.07.	Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang
4.1.2.03.08.	Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang
4.1.2.03.09.	Retribusi Izin Tebang dan Angkut Kayu

Kode	Uraian
1	2
4.1.2.03.10.	Retribusi Pemberian Hak Atas Tanah
4.1.2.03.11.	Retribusi Pemberian Izin Penggunaan Jalan
4.1.2.03.12.	Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian
4.1.2.03.13.	Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4.1.2.03.14.	Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair
4.1.2.03.15.	Retribusi Izin Air Bawah Tanah
4.1.2.03.16.	Retribusi Izin Pemboran Air Bawah Tanah
4.1.2.03.17.	Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.1.2.03.18.	Retribusi Izin Usaha Tempat Parkir
4.1.2.03.19.	Retribusi Sertifikasi Perbengkelan
4.1.2.03.20.	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
4.1.2.03.21.	Retribusi Izin Usaha Peternakan
4.1.2.03.22.	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
4.1.2.03.23.	Retribusi Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan penyongsongan beras
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.01.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.01.01.	Perusahaan Daerah.....
4.1.3.01.02.	Badan Usaha Milik Daerah
4.1.3.01.02.01.	Apotik Sidowaras I, II
4.1.3.01.02.02.	PDAM
4.1.3.01.02.03.	Laba Usaha/Deviden BPR BKK/BKK
4.1.3.01.02.04.	Laba Usaha/Deviden BKK
4.1.3.01.02.05.	Laba Usaha/Deviden BKPD (Badan Kredit Produksi Desa)
4.1.3.01.02.06.	Laba Usaha/Deviden Bank Jateng
4.1.3.02.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4.1.3.02.01.	BUMN
4.1.3.03.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.3.03.01.	Perusahaan
4.1.3.99...	oo
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.01.10.	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi
4.1.4.01.13.	Penjualan hasil pertanian
4.1.4.01.14.	Penjualan hasil kehutanan
4.1.4.01.15.	Penjualan hasil perkebunan
4.1.4.01.16.	Penjualan hasil peternakan
4.1.4.01.17.	Penjualan hasil perikanan
4.1.4.01.18.	Penjualan hasil sitaan
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro

Kode	Uraian
1	2
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga deposito
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank Jateng
4.1.4.03.02.	Rekening Deposito pada BKK
4.1.4.03.03.	Rekening Deposito pada BNI
4.1.4.03.04.	Rekening Deposito pada Bank Syariah Mandiri
4.1.4.03.05.	Rekening Deposito pada Bank Muamalat
4.1.4.03.06.	Rekening Deposito pada Bank Niaga
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan dari
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.06.09.	Bidang Pertanahan
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan
4.1.4.07.07.	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.07.08.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4.1.4.07.09.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.07.10.	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi 1)
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka

Kode	Uraian
1	2
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum
4.1.4.12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan
4.1.4.12.03.	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4.1.4.14.	Pendapatan Lain-lain
4.1.4.14.01.	Lelang Bengkulu
4.1.4.14.02.	Laba Revolving Dinas Pertanian
4.1.4.14.03.	Laba Revolving Dinas Peternakan
4.1.4.14.04.	Penerimaan Lainnya
4.1.4.14.05.	Penerimaan ISP
4.1.4.14.06.	Penerimaan Dinkes (Dana Jamkesmas, dll)
4.1.4.14.07.	Penerimaan Royalti Air Bersih
4.1.4.14.13.	Denda Pengembalian Peminjaman Buku
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD
4.1.4.15.01.	Pendapatan BLUD RSUD
4.1.4.16.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.17.	Pengembalian UUDP
4.1.4.17.01.	Pengembalian UUDP
4.1.4.18.	Rekening Listrik Pasar
4.1.4.18.01.	Rekening Listrik Pasar
4.1.4.19.	Sewa Mesin Listrik
4.1.4.19.01.	Sewa Mesin Listrik
4.1.4.20.	Penggunaan Mobil Jenazah
4.1.4.20.01.	Penggunaan Mobil Jenazah
4.1.4.21.	Sewa Hotel
4.1.4.21.01.	Sewa Hotel Novotel
4.2.	Dana Perimbangan
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi (Gas Alam)
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11.	Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum

Kode	Uraian
1	2
4.2.2.	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pekerjaan Umum
4.2.3.01.04.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.05.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
4.2.3.01.06.	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.07.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan
4.2.3.01.08.	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan
4.2.3.01.09.	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi
4.2.3.01.10.	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
4.2.3.01.11.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.01.12.	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
4.2.3.01.13.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan
4.2.3.01.14.	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
4.2.3.01.15.	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
4.2.3.01.16.	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1.	Pendapatan Hibah
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01.	Pemerintah
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
4.3.1.02.01.	Pemerintah Daerah
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4.3.1.03.01.	Badan/lembaga/organisasi swasta
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.3.1.04.01.	Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.2.	Dana Darurat
4.3.2.01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.04.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Tera
4.3.3.01.09.	Bagi Hasil dari Pajak Kelebihan Muatan
4.3.3.01.10.	Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak dari Provinsi 3)

Kode	Uraian
1	2
4.3.3.02.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.02.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)
4.3.3.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.04.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)
4.3.3.04.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01.	Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan
4.3.4.01.02.	Dana Penyesuaian Tunjangan Kesehatan
4.3.4.01.03.	Dana BOS
4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01.	Dana Otonomi Khusus
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.3.5.02.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.3.5.02.01.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten.....
4.3.5.03.	Bantuan Keuangan dari Kota
4.3.5.03.01.	Bantuan Keuangan dari Kota
4.3.6.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur
4.3.6.01.	Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal Dan Percepatan Pembangunan
4.3.6.01.01.	Dana Penguatan Desentralisasi Fisikal Dan Percepatan Pembangunan Daerah bidang Kesehatan Dst....
4.3.6.02.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
4.3.6.02.01.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)
4.3.6.02.02.	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)



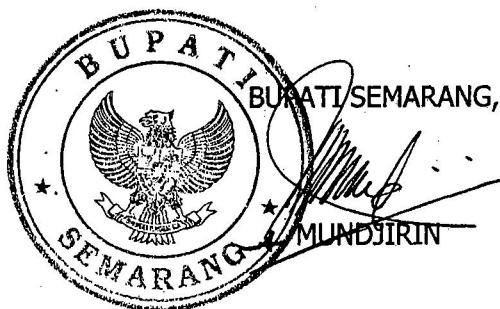
Lampiran V Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 67 Tahun 2011
Tanggal : 28-06-2011

KODE DAN KLASIFIKASI FUNGSI

KODE	URAIAN
01	Pelayanan umum
02	Pertahanan *)
03	Ketertiban dan ketentraman
04	Ekonomi
05	Lingkungan hidup
06	Perumahan dan fasilitas umum
07	Kesehatan
08	Pariwisata dan budaya
09	Agama *)
10	Pendidikan
11	Perlindungan sosial

Keterangan :

*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah.



**KODE DAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT FUNGSI UNTUK
 KESELARASAN DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

KODE			URAIAN
01			Pelayanan umum
01	1	06	Perencanaan Pembangunan
01	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
01	1	23	Statistik
01	1	24	Kearsipan
01	1	25	Komunikasi dan Informatika
02			Pertahanan *)
03			Ketertiban dan Ketentraman
03	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
04			Ekonomi
04	1	07	Perhubungan
04	1	14	Ketenagakerjaan
04	1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
04	1	16	Penanaman Modal
04	1	21	Ketahanan Pangan
04	1	22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04	2	01	Pertanian
04	2	02	Kehutanan
04	2	03	Energi dan Sumber Daya Mineral
04	2	05	Kelautan dan Perikanan
04	2	06	Perdagangan
04	2	07	Industri
04	2	08	Ketransmigrasian
05			Lingkungan Hidup
05	1	05	Penataan Ruang
05	1	08	Lingkungan Hidup
05	1	09	Pertanahan
06			Perumahan dan fasilitas umum
06	1	03	Pekerjaan Umum
06	1	04	Perumahan
07			Kesehatan
07	1	02	Kesehatan
07	1	12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
08			Pariwisata dan budaya
08	1	17	Kebudayaan

KODE			URAIAN
08	2	04	Pariwisata
09			Agama *)
10			Pendidikan
10	1	01	Pendidikan
10	1	18	Kepemudaan dan Olah Raga
10	1	26	Perpustakaan
11			Perlindungan sosial
11	1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil
11	1	11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	1	13	Sosial

Keterangan :

*) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah.



**KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Urusan : - NON URUSAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.	Pengelolaan surat menyurat
01.02.	Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumber daya air dan listrik
01.03.	Penyediaan Dan Perbaikan Peralatan Kerja serta Perlengkapan Kantor
01.04.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
01.05.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
01.06.	Penyediaan Logistik kantor
01.07.	Penatausahaan administrasi keuangan SKPD
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.09.	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
01.10.	Penyediaan Jasa Tenaga pendukung/ Teknis Perkantoran
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.01.	Pembangunan rumah jabatan
02.02.	Pembangunan rumah dinas
02.03.	Pembangunan gedung kantor
02.04.	Pengadaan mobil jabatan
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
02.06.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
02.07.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
02.08.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keamanan
02.09.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas
02.10.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.11.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
02.12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
02.13.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
02.14.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
02.15.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas
02.16.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
02.17.	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
02.18.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.01.	Pengadaan mesin/kartu absensi
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
03.03.	Pengadaan pakaian kerja lapangan
03.04.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
03.05.	Pengelolaan administrasi Kepegawaian
04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

04.01.	Pemulangan pegawai yang pensiun
04.02.	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
04.03.	Pemindahan tugas PNS
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal
05.02.	Sosialisasi /Bintek peraturan perundang-undangan
05.03.	Kesemaptaan Jasmani anggota Satpol PP
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
07.	Program Perencanaan
07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
07.02.	Penyusunan Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Sipil/Umum Semesteran
08.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
08.01.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pasar
08.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Fasilitas Umum
08.03.	Pembangunan Sarana dan prasarana Pasar
08.04.	Penyelenggaraan Unit Pelayanan Pengadaan
09.	Program Pendukung Pelayanan UPT Dinas Kesehatan
09.01.	Penyediaan Pendukung pelayanan Puskesmas Getasan
09.02.	Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Jetak
09.03.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tengaran
09.04.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Susukan
09.05.	Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Kaliwungu
09.06.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Suruh
09.07.	Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Dadapayam
09.08.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pabelan
09.09.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Semowo
09.10.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tuntang
09.11.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gedangan
09.12.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Banyubiru
09.13.	Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Jambu
09.14.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumowono
09.15.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ambarawa
09.16.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Duren
09.17.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Jimbaran
09.18.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bawen
09.19.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bringin
09.20.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bancak
09.21.	Penyediaan pendukung Pelayanan Puskesmas Bergas
09.22.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pringapus
09.23.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ungaran
09.24.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lerep
09.25.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Leyangan
09.26.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kalongan

09.27.	Penyediaan Pendukung Pelayanan Labkesda
--------	---

Urusan : 1.01. - PENDIDIKAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.01.	Pembangunan gedung sekolah
15.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
15.04.	Penambahan ruang guru sekolah
15.05.	Pembangunan ruang locker siswa
15.06.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
15.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
15.11.	Pembangunan ruang ibadah
15.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
15.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
15.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
15.17.	Pengadaan pakaian olahraga
15.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
15.19.	Pengadaan mebeleur sekolah
15.20.	Pengadaan pertengkapan sekolah
15.21.	Pengadaaan alat rumah tangga sekolah
15.22.	Pengadaaan sarana mobilitas sekolah
15.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
15.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah.
15.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
15.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
15.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
15.29.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana bermain
15.30.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
15.31.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
15.33.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
15.34.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
15.35.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
15.36.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
15.37.	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa

15.38.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah
15.39.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
15.40.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
15.41.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
15.42.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
15.43.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
15.44.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
15.46.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
15.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
15.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
15.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain
15.50.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
15.51.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
15.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
15.53.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
15.54.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
15.55.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
15.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini
15.59.	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
15.60.	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
15.61.	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
15.64.	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini
15.65.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
15.66.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
16.01.	Pembangunan gedung sekolah
16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
16.04.	Penambahan ruang guru sekolah
16.05.	Pembangunan ruang locker siswa
16.06.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
16.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain
16.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
16.11.	Pembangunan ruang ibadah
16.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
16.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
16.17.	Pengadaan pakaian olahraga
16.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
16.19.	Pengadaan mebeleur sekolah
16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
16.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
16.22.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
16.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
16.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
16.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
16.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
16.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
16.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
16.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
16.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
16.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
16.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
16.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
16.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat praktik dan peraga siswa
16.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
16.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
16.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
16.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
16.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
16.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
16.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
16.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
16.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
16.47.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
16.48.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
16.49.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
16.50.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
16.51.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
16.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
16.53.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
16.54.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
16.55.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
16.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
16.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
16.58.	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

16.59.	Pelatihan penyusunan kurikulum
16.60.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
16.61.	Pembinaan SMP terbuka
16.62.	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP
16.64.	Penyediaan Biaya operasional madrasah
16.65.	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
16.66.	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
16.67.	Penyelenggaraan paket A setara SD
16.68.	Penyelenggaraan paket B setara SMP
16.69.	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
16.70.	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
16.71.	Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
16.72.	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
16.73.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
16.74.	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
16.75.	Penyediaan beasiswa transisi
16.76.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
16.77.	Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
16.78.	Penyediaan Bea Siswa bagi keluarga tidak mampu
16.79.	Penyediaan Bea Siswa bagi siswa berprestasi
16.80.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Pendidikan Menengah
17.01.	Pembangunan gedung sekolah
17.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
17.04.	Penambahan ruang guru sekolah
17.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
17.06.	Pembangunan ruang locker siswa
17.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
17.08.	Pembangunan ruang seba guna/aula
17.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
17.11.	Pembangunan ruang ibadah
17.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
17.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
17.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
17.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah
17.17.	Pengadaan pakaian olahraga
17.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
17.19.	Pengadaan mebeluer sekolah

17.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah
17.21.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
17.22.	Pengadaan sarana mobillitas sekolah
17.23.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
17.24.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
17.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
17.27.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
17.28.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
17.29.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
17.30.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
17.32.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
17.33.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah.
17.34.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
17.35.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
17.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
17.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur sekolah
17.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
17.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
17.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
17.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
17.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
17.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
17.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
17.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
17.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
17.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
17.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
17.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
17.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
17.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
17.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
17.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
17.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
17.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
17.56.	Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah
17.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
17.58.	Pelatihan penyusunan kurikulum
17.59.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
17.60.	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan
17.61.	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
17.62.	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
17.63.	Penyelenggaraan paket C setara SMU

17.64.	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
17.65.	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
17.66.	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
17.67.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
17.68.	Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
17.69.	Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa
17.70.	Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah
17.71.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program Pendidikan Non Formal
18.01.	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
18.02.	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
18.03.	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
18.04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan
18.05.	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
18.07.	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
18.08.	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
18.10.	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
18.11.	Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal
18.12.	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
18.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program Pendidikan Luar Biasa
19.01.	Pembangunan gedung sekolah
19.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.03.	Penambahan ruang kelas sekolah
19.04.	Penambahan ruang guru sekolah
19.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
19.06.	Pembangunan ruang locker siswa
19.07.	Pembangunan sarana prasarana olahraga
19.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula
19.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
19.11.	Pembangunan ruang ibadah
19.12.	Pembangunan perpustakaan sekolah
19.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
19.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
19.16.	Pengadaan pakaian seragam sekolah dan kelengkapannya serta pakaian olahraga
19.17.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
19.18.	Pengadaan mebeluer sekolah
19.19.	Pengadaan perlengkapan sekolah

19.20.	Pengadaan alat rumah tangga sekolah
19.21.	Pengadaan sarana mobilitas sekolah
19.22.	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
19.23.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.24.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah
19.25.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah
19.26.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
19.27.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
19.28.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
19.29.	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.30.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
19.31.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
19.32.	Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
19.33.	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
19.34.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
19.35.	Pemeliharaan rutin/berkala buku-buku ajar
19.36.	Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa
19.37.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
19.38.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
19.39.	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
19.40.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah
19.41.	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
19.42.	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
19.43.	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
19.44.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
19.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
19.46.	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah
19.47.	Rehabilitasi sedang/berat ruang locker siswa
19.48.	Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga
19.49.	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula
19.50.	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
19.51.	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah
19.52.	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah
19.53.	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
19.54.	Rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya
19.55.	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
19.56.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
19.57.	Pelatihan penyusunan kurikulum
19.58.	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan
19.59.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
20.02.	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
20.03.	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
20.05.	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
20.06.	Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
20.07.	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
20.09.	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
20.10.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
20.11.	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
20.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.	Program.....
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
22.03.	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
22.05.	Pembinaan dewan pendidikan
22.06.	Pembinaan komite sekolah
22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
22.08.	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
22.09.	Penyediaan Jasa pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS
22.10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
23.	Program dst.....

Urusan : 1.02. - KESEHATAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
15.02.	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
15.03.	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
15.04.	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
15.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.01.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
16.03.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
16.04.	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
16.05.	Perbaikan gizi masyarakat
16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan

16.07.	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
16.08.	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat
16.10.	Pelayanan Penunjang Laboratorium
16.11.	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
16.12.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
16.13.	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
16.14.	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
16.15.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien ICU
16.16.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IBS
16.17.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IGD
16.18.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien One Day Care
16.19.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien Rawat Inap dan Perinatologi
16.20.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien Rawat Jalan
16.21.	Pelayanan Penunjang Radiologi
16.22.	Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesmas / Jamkesda
16.23.	Pelayanan Kesehatan Pasien Asuransi Kesehatan
16.24.	Pelayanan Pemulasaraan jenazah tidak dikenal
16.25.	Pengembangan pelayanan dan informasi medis
16.26.	Pengembangan pelayanan dan informasi keperawatan
16.27.	Upaya pemenuhan Jasa Obat Askes
16.28.	Upaya Pemenuhan Jasa Pelayanan Kesehatan
16.29.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
17.01.	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
17.03.	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
17.04.	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
17.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
18.01.	Fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat
18.02.	Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
18.03.	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri
18.04.	Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu
18.05.	Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitian dan industri terkait
18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
19.03.	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
19.04.	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
20.01.	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin
20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
20.05.	Peningkatan gizi lebih
20.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
21.01.	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
21.02.	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
21.03.	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
21.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
22.02.	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
22.03.	Pengadaan vaksin penyakit menular
22.04.	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
22.06.	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
22.07.	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
22.08.	Peningkatan Imunisasi
22.09.	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
22.10.	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
22.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
23.01.	Penyusunan standar kesehatan
23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
23.03.	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
23.04.	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan
23.05.	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
23.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.07.	Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan
23.08.	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
24.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
24.01.	Pelayanan operasi katarak
24.02.	Pelayanan kesehatan THT
24.03.	Pelayanan operasi bibir sumbing
24.04.	Pelayanan sunatan masal
24.05.	Penanggulangan ISPA
24.06.	Penanggulangan penyakit cacangan
24.07.	Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin
24.08.	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar
24.09.	Pelayanan kesehatan akibat lumpuh kayu
24.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

25.01.	Pembangunan puskesmas
25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu
25.03.	Pengadaan puskesmas perairan
25.04.	Pengadaan puskesmas keliling
25.05.	Pembangunan posyandu
25.06.
25.07.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
25.08.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25.09.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan
25.10.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
25.11.	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
25.12.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
25.13.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25.14.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
25.15.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
25.16.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan
25.17.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
25.18.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu
25.19.	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
25.20.	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
25.21.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
25.22.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan
25.23.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
26.01.	Pembangunan rumah sakit
26.02.	Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit
26.03.	Pembangunan gudang obat/apotik
26.04.	Penambahan ruang rapat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
26.05.	Pengembangan ruang gawat darurat
26.06.	Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU
26.07.	Pengembangan ruang operasi
26.08.	Pengembangan ruang terapi
26.09.	Pengembangan ruang isolasi
26.10.	Pengembangan ruang bersalin
26.11.	Pengembangan ruang inkubator
26.12.	Pengembangan ruang bayi
26.13.	Pengembangan ruang rontgen
26.14.	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit
26.15.	Pembangunan kamar jenazah
26.16.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
26.17.	Rehabilitasi bangunan rumah sakit
26.18.	Pengadaan alat-alat rumah sakit
26.19.	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
26.20.	Pengadaan ambulance/mobil jenazah

26.21.	Pengadaan mebeleur rumah sakit
26.22.	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
26.23.	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
26.24.	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
26.25.	Pengembangan tipe rumah sakit
26.26.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
27.02.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
27.03.	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
27.04.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
27.05.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
27.06.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
27.07.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi
27.08.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi
27.09.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi
27.10.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin
27.11.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator
27.12.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi
27.13.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen
27.14.	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit
27.15.	Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah
27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
27.18.	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
27.19.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit
27.20.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
27.21.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
28.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
28.01.	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
28.02.	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
28.03.	kemitraan pengolahan limbah rumah sakit
28.04.	kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan
28.05.	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
28.06.	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
28.07.	kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
28.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
29.01.	Penyuluhan kesehatan anak balita
29.02.	Imunisasi bagi anak balita
29.03.	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita
29.04.	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita
29.05.	Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan perawatan anak balita

29.06.	Pembangunan panti asuhan anak terlantar balita
29.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan
30.02.	rekrutmen tenaga perawat kesehatan
30.03.	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
30.04.	Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
30.05.	Pembangunan panti asuhan
30.06.	Pelayanan kesehatan
30.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
31.	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
31.01.	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
31.02.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
31.03.	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
31.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
32.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
32.01.	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.02.	Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.03.	Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
32.04.	Pelayanan Upaya peningkatan gerakan sayang ibu / Bayi
33.	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
33.01.	Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD
33.02.	Peningkatan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit BLUD
34.	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan
34.01.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Getasan
34.02.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jetak
34.03.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tenganan
34.04.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Susukan
34.05.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kaliwungu
34.06.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Suruh
34.07.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dadapayam
34.08.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pabelan
34.09.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Semowo
34.10.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tuntang
34.11.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gedangan
34.12.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Banyubiru
34.13.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jambu
34.14.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sumowono
34.15.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ambarawa
34.16.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Duren
34.17.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Jimbaran
34.18.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bawen
34.19.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bringin
34.20.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bancak

34.21.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bergas
34.22.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pringapus
34.23.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ungaran
34.24.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lerep
34.25.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Leyangan
34.26.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kalongan
34.27.	Peningkatan Pelayanan Labkesda
35.	Program Pengembangan pola Hidup Sehat Menuju Paradigma Sehat
35.01.	Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Dan Balita
35.02.	Pengembangan Taman Gizi Dan Tanaman Obat Keluarga
35.03.	Penimbangan Balita Dari Imunisasi
35.04.	Imunisasi, deteksi Dini dan Upaya Penyegetahan Penyakit
35.05.	Peningkatan Status Gizi dan Penanganan Gizi Buruk

Urusan : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pembangunan Jalan dan jembatan
15.01.	Perencanaan pembangunan jalan
15.02.	Survei kontur jalan dan jembatan
15.03.	Pembangunan jalan
15.04.	Perencanaan pembangunan jembatan
15.05.	Pembangunan jembatan
15.06.	Peningkatan Jalan Kabupaten
15.07.	Peningkatan Jalan Perkotaan
15.08.	Peningkatan Jalan Poros Desa
15.09.	Peningkatan Jalan Non Status
15.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
16.01.	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16.02.	Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong
16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
16.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
17.01.	Perencanaan turap/talud/bronjong
17.02.	Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
17.03.	Pembangunan turap/talud/bronjong
17.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18.01.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18.02.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
18.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

18.05.	Pengadaan Aspal untuk persediaan bantuan pemeliharaan jalan
18.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
19.	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
19.01.	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
19.02.	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
19.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
20.01.	Inspeksi kondisi Jalan
20.02.	Inspeksi kondisi Jembatan
20.03.	Evaluasi dan pelaporan
21.	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
21.01.	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
21.02.	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
21.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
22.01.	Penyusunan sistem informasi/data base jalan
22.02.	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
22.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
23.01.	Pembangunan gedung balai latihan kebinamargaan
23.02.	Pembangunan gedung workshop
23.03.	Pembangunan laboratorium kebinamargaan
23.04.	Pengadaan alat-alat berat
23.05.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
23.06.	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
23.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung balai latihan kebinamargaan
23.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop
23.09.	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
23.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
23.11.	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
23.12.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
23.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
24.01.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
24.02.	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
24.03.	Perencanaan pembangunan reservoir
24.04.	Perencanaan pembangunan pintu air
24.05.	Perencanaan normalisasi saluran sungai
24.06.	Pembangunan jaringan air bersih/air minum
24.07.	Pembangunan reservoir
24.08.	Pembangunan pintu air
24.09.	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
24.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
24.11.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum

24.12.	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
24.13.	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
24.14.	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
24.15.	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
24.16.	Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
24.17.	Pemberdayaan Petani Pemakai Air
24.18.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25.	Program penyediaan dan pengolahan air baku
25.01.	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25.02.	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25.03.	Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
25.04.	Pembangunan sumur-sumur air tanah
25.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
25.06.	Peningkatan distribusi penyediaan air baku
25.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
26.	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
26.01.	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
26.02.	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
26.03.	Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
26.04.	Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
26.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
26.06.	Peningkatan konversi air tanah.
26.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
27.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
27.01.	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
27.02.	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
27.03.	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
27.04.	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
27.05.	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum
27.06.	Pengembangan distribusi air minum
27.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
27.08.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
27.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
28.	Program pengendalian banjir
28.01.	Pembangunan reservoir pengendali banjir
28.02.	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
28.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
28.04.	Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir
28.05.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
28.06.	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
28.07.	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
28.08.	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
28.09.	Pembangunan prasarana pengaman pantai

28.10.	Pembangunan tanggul pemecah ombak
28.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
29.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
29.01.	Perencanaan pengembangan infrastruktur
29.02.	Pembangunan/peningkatan infrastruktur
29.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
30.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
30.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
30.02.	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan
30.03.	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30.04.	Pembangunan pasar perdesaaan
30.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
30.06.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
30.07.	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaaan
30.08.	Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
30.09.	Fasilitasi bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan
30.10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
31.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi
31.01.	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait
31.02.	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi
32.	Program pemberdayaan jasa konstruksi
32.01.	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
32.02.	Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)
32.03.	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat
33.	Program pengawasan jasa konstruksi
33.01.	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
33.02.	Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
33.03.	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi
33.04.	Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan
33.05.	Pengawasan terhadap K-3
34.	Program dst.....

Urusan : 1.04. - PERUMAHAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan Perumahan
15.01.	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
15.02.	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
15.03.	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
15.04.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
15.05.	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
15.06.	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
15.08.	Perencanaan Pengembangan Perumahan
15.09.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16.	Program Lingkungan Sehat Perumahan
16.01.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
16.02.	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
16.03.	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan
16.04.	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
16.05.	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
16.06.	Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
16.07.	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman
16.08.	Perencanaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
17.01.	Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan
17.02.	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
17.03.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
17.04.	Peningkatan sistem pemberian kredit pemilikan rumah
17.05.	Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
17.06.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
17.07.	Pelaksanaan perijinan IMB
17.08.	Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab perumahan keluarga miskin
17.09.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
18.01.	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
18.02.	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial
18.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
19.01.	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
19.02.	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran
19.03.	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
19.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
19.05.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
19.06.	Kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
19.07.	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
19.09.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
19.10.	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
19.11.	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
19.12.	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
19.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program pengelolaan areal pemakaman

20.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman
20.02.	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal
20.03.	Koordinasi pengelolaan areal pemakaman
20.04.	Koordinasi penataan areal pemakaman
20.05.	Pemberian perijinan pemakaman
20.06.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
20.07.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
20.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.	Program dst.....

Urusan : 1.05. - PENATAAN RUANG

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Perencanaan Tata Ruang
15.01.	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang
15.02.	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
15.03.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
15.04.	Penyusunan rencana tata ruang wilayah
15.05.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
15.06.	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
15.07.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
15.08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW
15.09.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
15.10.	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
15.11.	Revisi rencana tata ruang
15.12.	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
15.13.	Survey dan pemetaan
15.14.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota
15.15.	Pengelolaan Administrasi Prasarana Daerah
15.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
16.	Program Pemanfaatan Ruang
16.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
16.02.	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
16.03.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
16.04.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
16.05.	Survey dan pemetaan
16.06.	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang
16.07.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
16.08.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
17.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17.01.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
17.02.	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

17.03.	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
17.04.	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
17.05.	Pengawasan pemanfaatan ruang
17.06.	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
17.07.	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
17.08.	Pelaksanaan perijinan IMb
17.09.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

Urusan : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan data/informasi
15.01.	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
15.02.	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
15.03.	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
15.04.	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi
15.05.	Penyusunan profile daerah
16.	Program Kerjasama Pembangunan
16.01.	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
16.02.	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
16.03.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
16.04.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
16.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
17.01.	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah
17.02.	Sosialisai kebijakan pemerintah dalam penyelesaian perbatasan antar negara
17.03.	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
17.04.	Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
17.05.	Fasilitasi bantuan prasarana dan sarana desa
17.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.01.	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.02.	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.03.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
19.01.	Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
19.02.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
19.03.	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
19.04.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
19.05.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
19.06.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
19.07.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

19.08.	Koordinasi perencanaan penanganan perpikiran
19.09.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
19.10.	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan
19.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
20.01.	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
20.02.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
20.03.	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
21.	Program perencanaan pembangunan daerah
21.01.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
21.02.	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJPD
21.03.	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RPJMD
21.04.	Penyusunan RKPD
21.05.	Koordinasi Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah
21.06.	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
21.07.	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
21.08.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
21.09.	-
21.10.	-
21.11.	-
21.12.	-
21.13.	-
21.15.	-
22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi
22.01.	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
22.02.	Penyusunan indikator ekonomi daerah
22.03.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
22.05.	Penyusunan tabel input output daerah
22.06.	Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
22.07.	Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
22.08.	Penyusunan Masterplan Pembangunan Kepariwisata
22.09.	Penyusunan Masterplan Pembangunan Perindustrian
22.10.	Penyusunan Mastarplan Pembangunan Pertanian
23.	Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya
23.01.	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
23.02.	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
24.01.	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
24.02.	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
24.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25.	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

25.01.	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana
25.02.	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
25.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan : 1.07. - PERHUBUNGAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
15.01.	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
15.02.	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
15.03.	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
15.04.	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
15.05.	Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang
15.06.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
15.07.	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
15.08.	Kegiatan Evaluasi kinerja jaringan Jalan
15.09.	Kegiatan Penyusunan Inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan Fasilitas lalulintas
15.10.	Monitoring , Evaluasi dan pelaporan
16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
16.01.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
16.02.	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
16.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
16.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
16.05.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Apiil, Rambu, Halte dan RPPJ
17.	Program peningkatan pelayanan angkutan
17.01.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
17.02.	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
17.03.	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
17.04.	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
17.05.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
17.06.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
17.07.	Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
17.08.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
17.09.	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
17.10.	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
17.11.	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
17.12.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
17.13.	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
17.15.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
17.16.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
17.17.	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang

17.18.	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang
17.19.	Pelayanan Perijinan Angkutan Orang
17.20.	Pelayanan perijinan angkutan barang
17.21.	Pelayanan pengelolaan perparkiran
17.22.	Kegiatan Posko Angkutan Lebaran
17.23.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
18.01.	Pembangunan gedung terminal
18.02.	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
18.03.	Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal
19.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
19.01.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
19.02.	Pengadaan Marka Jalan
19.03.	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
19.04.	Pengadaan Alat pemberi Isyarat Lalulintas (APILL)
19.05.	Fasilitasi pendukung kegiatan lalulintas dan angkutan jalan
20.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
20.01.	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
20.02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
20.03.	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
21.	Program dst.....

Urusan : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
15.01.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
15.02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
15.03.	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
15.04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
15.05.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
15.06.	Bimbingan teknis persampahan
15.07.	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
15.08.	Kerjasama pengelolaan persampahan
15.09.	Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah
15.10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
15.11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
15.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16.01.	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
16.02.	Koordinasi penilaian langit biru
16.03.	Pemantauan Kualitas Lingkungan
16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

16.05.	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
16.06.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
16.07.	Pengkajian dampak lingkungan
16.08.	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan
16.09.	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)
16.10.	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
16.11.	Pengembangan produksi ramah lingkungan
16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL
16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
16.15.	Pengkajian pengembangan sistem insentif dan disinsentif
16.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
17.01.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
17.02.	Pantai dan Laut Lestari
17.03.	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
17.04.	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
17.05.	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
17.06.	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
17.07.	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air
17.08.	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA
17.09.	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
17.10.	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
17.11.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut
17.12.	Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional
17.13.	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
17.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
17.15.	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi
17.16.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.17.	Dst.....
18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
18.02.	Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
18.03.	Rehabilitasi hutan dan lahan
18.04.	Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan
18.05.	Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
18.06.	Sosialisasi pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun
18.07.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
18.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
19.01.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

19.02.	Pengembangan data dan informasi lingkungan
19.03.	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
19.04.	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20.01.	Pengujian emisi kendaraan bermotor
20.02.	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
20.03.	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
20.04.	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
20.05.	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
20.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
21.01.	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
21.02.	Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
21.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.	Program Pengendalian kebakaran hutan
22.01.	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
22.02.	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan
22.03.	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
22.04.	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
22.05.	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
22.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
23.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
23.02.	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
24.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
24.01.	Penyusunan kebijakan, norma, standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
24.02.	Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
24.03.	Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
24.04.	Penyusunan program pengembahan RTH
24.05.	Penataan RTH
24.06.	Pemeliharaan RTH
24.07.	Pengembangan taman rekreasi
24.08.	Pengawasan dan pengendalian RTH
24.09.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
24.10.	Monitoring dan evaluasi
25.	Program dst.....

Urusan : 1.09. - PERTANAHAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
15.01.	Penyusunan sistem pendaftaran tanah

15.02.	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah
16.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
16.01.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
16.02.	Penyuluhan hukum pertanahan
16.03.	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui Sertifikasi dan Pemasangan Papan Nama Tanah-Tanah Pemda
17.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
17.01.	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
18.01.	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
19.	Program dst.....

Urusan : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan
15.01.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
15.02.	Pelatihan tenaga pengelola SIAK
15.03.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
15.04.	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK
15.05.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
15.06.	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
15.07.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
15.09.	Pengembangan data base kependudukan
15.10.	Penyusunan kebijakan kependudukan
15.11.	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
15.12.	Sosialisasi kebijakan kependudukan
15.13.	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
15.14.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil
15.15.	Peningkatan pelayanan Publik pendaftaran Penduduk
15.16.	Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan Kelahiran dan Kematian
15.17.	Peningkatan pelayanan Publik Pencatatan perkawinan Perceraian, Pengakuan dan pengesahan anak
15.18.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Urusan : 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
15.01.	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
15.02.	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
15.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
16.01.	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
16.02.	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
16.03.	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
16.04.	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
16.05.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
16.06.	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
16.07.	Evaluasi Pelaksanaan PUG
16.08.	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
17.01.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
17.02.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
17.03.	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
17.04.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
17.05.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
17.06.	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
17.07.	Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat
17.08.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
17.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
18.01.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
18.02.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
18.03.	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
18.04.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
18.05.	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
18.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
19.01.	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
19.02.	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Urusan : 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Keluarga Berencana
15.01.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
15.02.	Pelayanan KIE
15.03.	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
15.04.	Promosi Pelayanan Khiba
15.05.	Pembinaan Keluarga Berencana

15.06.	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
16.01.	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
16.02.	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
17.	Program pelayanan kontrasepsi
17.01.	Pelayanan konseling KB
17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
17.03.	Pengadaan alat kontrasepsi
17.04.	Pelayanan KB medis operasi
18.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
18.01.	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
19.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
19.01.	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
20.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20.01.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
20.02.	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
21.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
21.01.	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
22.	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
22.01.	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
23.	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
24.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
24.01.	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Urusan : 1.13. - SOSIAL

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
15.01.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
15.02.	Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
15.03.	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
15.04.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
15.05.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
15.06.	Fasilitasi Distribusi pangan bagi fakir miskin
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
16.01.	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
16.02.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
16.03.	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

16.04.	Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
16.05.	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
16.06.	Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
16.08.	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
16.09.	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
16.10.	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
16.11.	Pelayanan KIE bagi para kelompok resiko tinggi (Resili) HIV / AIDS
16.12.	Pelayanan KIE bagi tokoh masyarakat, Karang taruna, PSM, dalam pencegahan permasalahan sosial
16.13.	Pelaksanaan bimbingan dan motivasi bagi bekas penderita penyakit kronis
16.14.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial
16.15.	Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan bencana berbasis Masyarakat
16.16.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
17.	Program pembinaan anak terlantar
17.01.	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
17.02.	Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar
17.03.	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
17.04.	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
17.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
17.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
18.01.	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
18.02.	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
18.03.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
18.04.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
18.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo.
19.01.	Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
19.02.	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
19.03.	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
19.04.	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
19.05.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik
19.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
20.01.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
20.02.	Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial
20.03.	Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
20.04.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
20.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

21.01.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
21.02.	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
21.04.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
21.05.	Kegiatan Penyaluran Santunan Kemahalan
22.	Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan
22.01.	Facilitasi Lembaga Sosial Keagamaan

Ususan : 1.14. - KETENAGAKERJAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
15.01.	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
15.02.	Pembangunan balai latihan kerja
15.03.	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
15.04.	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
15.05.	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
15.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
15.08.	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK
15.09.	Pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis Masyarakat
15.10.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16.01.	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
16.02.	Penyebutan informasi bursa tenaga kerja
16.03.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan
16.04.	Penyediaan tenaga kerja siap pakai
16.05.	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
16.06.	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
17.01.	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
17.02.	Facilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
17.03.	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
17.05.	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
17.06.	penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
17.07.	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja
17.08.	Facilitasi Penentuan dan pelaksanaan upah minimum
17.09.	Sosialisasi dan pembinaan syarat kerja
17.10.	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan

17.11.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang kelenagakerjaan mengenai norma kerja dan kesehatan dan keselamatan kerja
17.12.	Facilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial kelenagakerjaan dan pemberdayaan kelenagakerjaan hubungan industri
17.13.	Sosialisasi peraturan perundangan di bidang perselisihan dan kelenagakerjaan hubungan industri
17.14.	peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap norma kelenagakerjaan
17.15.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.	Program dst.....

Unsur : 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program pendataan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
15.01.	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.02.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.03.	Facilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah
15.04.	Pendirian unit penanganan pengaduan
15.05.	Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan nasional
15.06.	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
15.07.	Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah
15.08.	Facilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
15.09.	Facilitasi Pemaksimalan proses produksi Usaha Kecil Menengah
15.10.	Pemberian Facilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16.01.	Facilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
16.02.	Memfasilitasi peningkatan komitmen investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing
16.03.	Memfasilitasi peningkatan komitmen usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
16.04.	Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
16.05.	Facilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
16.08.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
16.09.	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
16.10.	Pelatihan manajemen usaha koperasi
16.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.01.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
17.02.	Pengembangan kluster bisnis
17.03.	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
17.04.	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17.05.	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

17.06.	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17.07.	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
17.08.	Penyelenggaraan pembinaan Industri rumah tangga, Industri kecil dan Industri menengah
17.09.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
17.10.	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
17.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18.01.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
18.02.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
18.03.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
18.04.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
18.05.	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
18.06.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
18.07.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
18.08.	Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi
18.09.	Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi
18.10.	Peningkatan sistem pelaporan KSP/USP
18.11.	Penilaian kesehatan koperasi
18.12.	Penyuluhan peraturan perundang undangan koperasi dan UMKM
18.13.	Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM
18.14.	Pengendalian KSP/USP dan KKS/UJKS
18.15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program dsL...

Urusan : 1.16. - PENANAMAN MODAL

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
15.01.	Peningkatan fasilitas tenwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
15.02.	Pengembangan potensi unggulan daerah
15.03.	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPD)
15.04.	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA
15.05.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
15.06.	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
15.07.	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatatur Badan Penanaman Modal Daerah
15.08.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
15.09.	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
15.10.	Penyelenggaraan pameran investasi
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
16.01.	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur

16.02.	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
16.03.	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal
16.04.	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
16.05.	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
16.06.	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
16.07.	Kajian Kebijakan penanaman modal
16.08.	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal
16.09.	Pembelian saham Perbankan
16.10.	Penanaman Modal pada Perusahaan Daerah
16.11.	Penanaman Modal pada BUMD
16.12.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
17.	Program Penyajian potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
17.01.	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Ususan : 1.17. - KEBUDAYAAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya
15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
15.02.	Penatalaksanaan naskah kuno-nusantara
15.03.	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah
15.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
15.05.	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16.01.	Facilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
16.02.	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
16.03.	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
16.04.	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
16.06.	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
16.07.	Pengembangan nilai dan geografi sejarah
16.08.	Perakaman dan digitalisasi bahan pustaka
16.09.	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala
16.10.	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
16.11.	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
16.12.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
16.13.	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.01.	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
17.02.	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
17.03.	Penyelenggaraan dialog kebudayaan
17.04.	Facilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

17.05.	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
17.06.	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
17.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
18.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
18.01.	Fasilitasi Pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta
18.02.	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah
18.03.	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program Pengembangan SDM Kebudayaan
19.01.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan (Kesenian)
19.02.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan (BCB)
20.	Program Pengembangan Pemasaran
20.01.	Pengembangan Statistik Kepariwisataaan

Unsur : 1.18. - PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
15.01.	Pendataan potensi kepemudaan
15.02.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
15.03.	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan
15.04.	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH
15.05.	Peningkatan keimanan dan ketakwaannya kepemudaan
15.06.	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda
15.07.	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat
15.08.	Perencanaan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan
15.09.	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda
15.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program peningkatan peran serta kepemudaan
16.01.	Pembinaan Organisasi kepemudaan
16.02.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
16.03.	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
16.04.	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda
16.05.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
16.06.	Lomba kreasi dan kaya tulis limlah dikalangan pemuda
16.07.	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
16.08.	Pameran prestasi hasil karya pemuda
16.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
17.01.	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
17.02.	Pelatihan keterampilan bagi pemuda
18.	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

18.01.	Perbaikan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
19.01.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
19.02.	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi
19.03.	pengembangan perencanaan olahraga terpadu
19.04.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga
19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga
19.06.	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga
19.07.	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga
19.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
20.02.	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah
20.03.	Pembinaan dan pembinaan olahragawan berbakat
20.04.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
20.07.	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
20.08.	Bembarian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
20.09.	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga
20.10.	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
20.11.	Pengembangan olahraga rekreasi
20.12.	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga
20.13.	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
20.14.	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
20.15.	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah
20.16.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga
20.17.	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
21.01.	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
21.03.	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
21.05.	Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
21.06.	Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga
21.07.	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
22.	Program dst...

Ususan : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	
15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

15.01.	Penyapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.02.	Pembangunan pos jaga/ ronda
15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.04.	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
15.05.	pengendalian keamanan lingkungan
15.06.	Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan
15.07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.	Program pemeliharaan kantarbitmas dan pencegahan tindak kriminal
16.01.	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
16.03.	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kelaksaaan
16.04.	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
16.05.	Pengawasan umum pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati serta peraturan lain di Daerah
16.06.	Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program pengembangan wawasan kebangsaan
17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
17.02.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
18.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
18.01.	Facilitasi pencapaian halagoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
18.02.	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
18.03.	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
19.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kelutiban dan keamanan
19.01.	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
20.02.	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktik prostitusi
20.03.	Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu
20.04.	Penyuluhan pencegahan dan pemberitaan aksi premanisme
20.05.	Penyuluhan pencegahan dan pemberitaan tindak penyelundupan
20.06.	Penyuluhan pencegahan praktik perjudian
20.07.	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur
20.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
21.	Program pendidikan politik masyarakat
21.01.	Penyuluhan kepada masyarakat
21.02.	Facilitasi penyelesaian perselisihan partai politik
21.03.	koordinasi forum-forum diskusi politik
21.04.	Penyusunan data base partai politik
21.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.	Program percegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
22.01.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Urusan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAER

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	<p>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</p> <p>15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah</p> <p>15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama</p> <p>15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan</p> <p>15.04. Rapat-rapat paripurna</p> <p>15.05. Kegiatan Reses</p> <p>15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah</p> <p>15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</p> <p>15.08. Sosialisasi peraturan perundang-undangan</p> <p>15.09. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD</p> <p>15.10. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah</p> <p>16.</p> <p>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</p> <p>16.01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat</p> <p>16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri</p> <p>16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA</p> <p>16.04. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah</p> <p>16.05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah</p> <p>16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</p> <p>16.07. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>16.08. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah bagi Sekda dan Asisten</p> <p>16.09. Dialog Audiensi dengan Tenaga Kebersihan se-Kabupaten Semarang</p> <p>16.10. Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK)</p> <p>16.11. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (Forkompanda)</p> <p>17.</p> <p>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>17.01. Penyusunan analisa standar belanja</p> <p>17.02. Penyusunan standar satuan harga</p> <p>17.03. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah</p> <p>17.04. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</p> <p>17.05. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi</p> <p>17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD</p> <p>17.07. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD</p> <p>17.08. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD</p> <p>17.09. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD</p> <p>17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>17.11. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>17.12. Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah</p> <p>17.13. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</p>

17.15.	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
17.16.	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
17.17.	Peningkatan manajemen investasi daerah
17.18.	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah
17.19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
17.20.	Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
17.21.	Penyesaian Administrasi Kerugian Daerah (PTGR)
17.22.	Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan APBD
17.23.	Penyusunan Rencana Peraturan KDH tentang pajak daerah dan Retribusi daerah
17.24.	Pembiayaan teknis administrasi pembangunan
17.25.	Pengelolaan Kas Daerah
17.26.	Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD
17.27.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
17.28.	Perancangan PBB dan BPHTB di Wilayah I
17.29.	Perancangan PBB dan BPHTB di Wilayah II
17.30.	Perancangan PBB dan BPHTB di Wilayah III
17.31.	Perancangan PBB dan BPHTB di Wilayah IV
17.32.	Monitoring dan Evaluasi BUMD
17.33.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18.	Program pembiayaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
18.01.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
18.02.	Evaluasi Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota
18.03.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota
18.04.	Penyusunan standar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
18.05.	Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
19.	Program pembiayaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
19.01.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
19.02.	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
19.03.	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
19.04.	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Desa
19.05.	Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kas Desa
19.06.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20.	Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
20.01.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
20.02.	Peranganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
20.03.	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
20.04.	Peranganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
20.05.	Inventarisasi temuan pengawasan
20.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
20.07.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
20.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
21.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya
21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya

21.02.	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
22.	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.01.	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22.02.	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
23.01.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
24.	Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat
24.01.	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
24.02.	Penatausahaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
25.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
25.01.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan
25.02.	Fasilitasi/pembentukan kekuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
25.03.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
25.04.	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
26.01.	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
26.03.	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
26.04.	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
26.05.	Publikasi peraturan perundang-undangan
26.06.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
26.07.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok KADARKUM Tingkat Kabupaten Semarang
27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.01.	Fasilitasi penyajian data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
27.02.	Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran
27.03.	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
27.04.	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
28.	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan
28.01.	Kegiatan Pemerintahan
28.02.	Kegiatan Pembangunan
28.03.	Kegiatan Kesejahteraan Sosial / Kemasyarakatan
28.04.	Kegiatan Keamanan, Ketertarikan dan Keterliban Umum
28.05.	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan desa
29.	Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah
29.01.	Pendapatan, Pendapatan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dan Obyek Pajak
29.02.	Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Pendistribusian SKPD
29.03.	Penagihan Pajak Daerah dan Keberatan
29.04.	Penangan pelanggaran Pajak Daerah
29.05.	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah, Koordinasi Pendapatan pajak dan Retribusi Daerah
30.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
30.01.	Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan
30.02.	Fasilitasi Pemantapan SOTK Perangkat Daerah

30.03.	Penyusunan Pedoman Pendayagunaan Aparatur Daerah
30.04.	Penyediaan Informasi Kelembagaan, Ketataaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur Daerah
30.06.	Fasilitasi ketataaksanaan pelayanan publik
30.07.	Penyusunan standar pelayanan publik
30.08.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur daerah
30.09.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan
30.10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
31.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
31.01.	Facilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PLKADES)
31.02.	Penataan Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa
31.03.	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD)
32.	Facilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan
32.01.	Penanganan Kasus Peradilan
33.	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
33.01.	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
33.02.	Pengadaan empa Penampungan Sementara Dan Evakuasi Penduduk dari ancaman / korban bencana alam
33.03.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
33.04.	Pengadaan Logistik dan oba obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
33.05.	Monitoring , Evaluasi dan pelaporan
35.	Program.....
36.	Program Pendidikan Kedisnasan (kepegawain)
36.01.	Pendidikan dan pelatihan teknis
36.02.	Pendidikan penjenjangan struktural
36.03.	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
36.04.	Pembuatan buku juknis/juklak
36.05.	Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
36.06.	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme
37.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (kepegawain)
37.01.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
37.02.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
37.03.	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
37.04.	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
37.05.	Penyelenggaraan Birek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
38.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (kepegawain)
38.01.	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
38.02.	Seleksi penerimaan calon PNS
38.03.	Penempatan PNS
38.04.	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
38.05.	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawain daerah
38.06.	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
38.07.	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
38.08.	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
38.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
38.10.	Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS

38.11.	Perberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
38.12.	Perberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
38.13.	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
38.14.	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
38.15.	Koordinasi Penyelenggaraan diklat
38.16.	Penyelenggaraan sumpah janji PNS
38.17.	Kajian Kinerja Pegawai Negri Sipil
38.18.	Pembinaan Kedisiplinan PNS
38.19.	Penyusunan Formasi PNS Daerah
38.20.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
39.	Program Pelimpahan Kewenangan Kepada Kecamatan
39.01.	Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Tata Pemerintahan
39.02.	Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pembangunan
39.03.	Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Kesejahteraan Rakyat
39.04.	Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Ketertamanan dan ketertiban umum
39.05.	Kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan desa
39.06.	kegiatan Pelimpahan Kewenangan Bidang Pelayanan Umum
40.	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan
40.01.	Kegiatan Tata pemerintahan, Ketertamanan dan Keterliban Masyarakat
40.02.	Kegiatan Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat

Unsen : 121. - KETAHANAN PANGAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
15.01.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
15.02.	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
15.03.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
15.04.	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
15.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
15.06.	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
15.07.	Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
15.08.	Pengembangan cadangan pangan daerah
15.09.	Pengembangan desa mandiri pangan
15.10.	Pengembangan lumbung pangan desa.
15.11.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
15.12.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan
15.13.	Koordinasi kebijakan perberasan
15.14.	Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
15.15.	Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
15.16.	Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan
15.17.	Facilitasi Distribusi / Penyaluran beras untuk keluarga miskin
15.18.	Pemantapan pekarangan untuk pengembangan pangan

15.19.	Pengembangan perikanan/pebibitan
15.20.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
15.21.	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Urusan : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
15.02.	Penyenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
15.03.	Penyenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
15.04.	Pendampingan dan pengembangan P2KP/PiPM(Paket dan Replikasi)
15.05.	Pendampingan/Pengembangan program pengembangan kecamatan/program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
16.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
16.01.	Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman
16.02.	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
16.03.	Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
16.04.	Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan
16.05.	Fasilitas permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
16.06.	Fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
17.03.	Pemberian stimulan pembangunan desa
17.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
18.01.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
18.02.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
18.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
19.01.	Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha ekonomi Produktif
20.	Program dst.....

Urusan : 1.23. - STATISTIK

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
15.02.	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
15.03.	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

15.04.	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB
--------	---

Ususan : 1.24. - KEARSIPAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
15.01.	Pembangunan data base informasi kearsipan
15.02.	Pengumpulan data
15.03.	Pengklasifikasikan data
15.04.	Penyusunan sistem katalog data
15.05.	Pengadaan sarana penyimpanan
15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan
15.07.	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan
16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
16.01.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
16.02.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
16.03.	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
16.04.	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
17.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
17.01.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
17.02.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
17.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
18.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
18.01.	Penyusunan dan pemberian naskah sumber arsip
18.02.	Penyediaan sarana layanan informasi arsip
18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
18.04.	Bimbingan teknis kearsipan

Ususan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
15.03.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
15.04.	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi
15.06.	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
15.07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
16.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
16.01.	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
17.	Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

18.	Program kerjasama Informasi dan media massa
18.01.	Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah
18.02.	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
18.03.	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
18.04.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah Melalui Peresmian Proyek se Kabupaten Semarang
18.05.	Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Operasional Radio Suara Serasi
18.06.	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui dokumen dan Advetorial
18.07.	Kegiatan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah melalui penerbitan Majalah Gemma Serasi
19.	Program det.....

Unsur : 1.26. -PERPUSTAKAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
15.01.	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
15.02.	Pengembangan minat dan budaya baca
15.03.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
15.04.	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan
15.05.	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
15.06.	Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca
15.07.	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca
15.08.	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
15.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
15.10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program det.....

Unsur : 2.01. -PERTANIAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
15.01.	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
15.02.	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
15.03.	Peningkatan kemampuan lembaga petani
15.04.	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani
15.05.	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur
16.	Program Peningkatan Produksi Pangan
16.01.	Penanganan daerah rawan pangan
16.02.	Penyusunan data base potensi produk pangan
16.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
16.04.	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

16.05.	Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija
16.06.	Pengembangan diversifikasi tanaman
16.07.	Pengembangan pertanian pada lahan kering
16.08.	Pengembangan perbenihan/perbibitan
16.09.	Pengembangan sistem informasi pasar
16.10.	Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan pedesaan
16.11.	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
16.12.	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi
16.13.	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya
16.14.	Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
16.15.	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
16.16.	Penyuluhan sumber pangan alternatif
16.17.	Pengembangan Intensifikasi tanaman hortikultura
16.18.	Pengembangan kawasan hortikultura
16.19.	Penanganan statistik tanaman pangan dan hortikultura
16.20.	Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
16.21.	Pengelolaan lahan dan air tanaman pangan dan hortikultura
16.22.	Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
16.23.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
17.01.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
17.02.	Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
17.03.	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
17.04.	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
17.05.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
17.06.	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
17.07.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
17.08.	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem joni
17.09.	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
17.10.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
17.11.	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat
17.12.	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan
17.13.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
18.01.	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.03.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.04.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.05.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
18.06.	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

18.07.	Monitoring dan evaluasi dana Bergilir dari Pemkot dan Pusat
19.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19.01.	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
19.02.	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
19.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
19.04.	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
19.05.	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
19.06.	Pengembangan diversifikasi tanaman tembakau
19.07.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
20.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
20.02.	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
20.03.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
21.	Program pencegahan dan perantagulangan penyakit ternak
21.01.	Pendataan masalah peternakan
21.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit mulut ternak
21.03.	Penusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
21.04.	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
21.05.	Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak
21.06.	Operasionalisasi UPTD Labkeswan dan Puskeswan
21.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
22.	Program peningkatan produksi hasil peternakan
22.01.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
22.02.	Pembibitan dan perawatan ternak
22.03.	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
22.04.	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
22.05.	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
22.06.	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak
22.07.	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
22.08.	Pengembangan agribisnis peternakan
22.09.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan
22.10.	Operasionalisasi UPTD Pembibitan Ternak Unggul
22.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
23.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
23.01.	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
23.02.	Facilitasi Kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer
23.03.	Pembangunan sarana dan prasarana nasar produksi hasil peternakan
23.04.	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan
23.05.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
23.06.	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi peternakan
23.07.	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
23.08.	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
23.09.	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat
23.10.	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

23.11.	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat
23.12.	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan
23.13.	Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan
23.14.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
24.01.	Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
24.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
24.03.	Pemeliharaan ruih/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
24.04.	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
24.05.	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
24.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
25.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
25.01.	Pengamanan produk hewan dan ikulannya
25.02.	Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Zoonosa dan Peningkatan Kesejahteraan Hewan
25.03.	Operasionalisasi UPTD RPH / RPU
26.	Program det.....

Ususan : 202. - KEHUTANAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
15.01.	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
15.02.	Pengembangan hutan tanaman
15.03.	Pengembangan hasil hutan non-kayu
15.04.	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan
15.05.	Optimalisasi PNBP
15.06.	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
15.07.	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
15.08.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
15.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
16.	Program rehabilitasi hutan dan lahan
16.01.	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
16.02.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
16.03.	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
16.04.	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
16.05.	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
16.06.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
17.01.	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
17.02.	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan
17.03.	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
17.04.	Penanggulangan kebakaran baton dan lahan

17.05.	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
18.	Program pemanfaatan kawasan baton industri
18.01.	Pertanian tanaman palawija, padi gogorancah
19.	Program pembinaan dan pemberitaan industri hasil hutan
19.01.	Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.02.	Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.03.	Pengawasan dan pemberitaan pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
19.04.	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
19.05.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.	Program perencanaan dan pengembangan baton
20.01.	Pengembangan hutan masyarakat adat
20.02.	Pendampingan kelompok usaha pertulanan rakyat
21.	Program dst.....

Unsur : 203. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
15.01.	Penyusunan regulasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
15.02.	Penyusunan Regulasi Pertambangan panas Bumi
15.03.	Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Air Tanah
15.04.	Sosialisasi Peraturan pertambangan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah
15.05.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan
15.06.	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan air tanah
15.07.	Penyusunan Data potensi Mineral bukan logam dan batuan
15.08.	Penyusunan Data Potensi Cekungan Air Tanah
15.09.	Penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan
15.10.	Penyusunan Wilayah pertambangan rakyat
15.11.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
16.	Program pengawasan dan pemberitaan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
16.01.	Pengawasan pemberitaan kegiatan pertambangan rakyat
16.02.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat
16.03.	Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
16.04.	Penyusunan Data Dasar Geologi dan sumber daya mineral
17.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
17.01.	Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
17.02.	Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi sarana dan Prasarana LPU
17.03.	Perluasan Jaringan Listrik Masuk Desa
18.	Program dst..

Unsur : 2.04. -PARIWISATA

PROGRAM DAN KEGIATAN	
1	2
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.01.	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
15.02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
15.03.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
15.04.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
15.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
15.07.	Pengembangan Statistik Kepariwisata
15.08.	Pelatihan pemandu wisata terpadu
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
16.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan
16.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
16.03.	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
16.04.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
16.05.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata
16.07.	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi
17.	Program Pengembangan Kemitraan
17.01.	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database
17.02.	Pengembangan dan penguatan ilibang, kebudayaan dan pariwisata
17.03.	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
17.04.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
17.05.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
17.06.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
17.07.	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
17.08.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
17.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.	Program dst.....

Unsur : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	
1	2
15.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
15.01.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
16.	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengurusan dan pengendalian sumberdaya kelautan
16.01.	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
17.	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

17.01.	Perubahan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
18.	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
18.01.	Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
19.	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
19.01.	Perubahan budaya kelautan
20.	Program pengembangan budidaya perikanan
20.01.	Pengembangan bibit ikan unggul
20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
20.03.	Pembinaan dan pengembangan perikanan
20.04.	Operasionalisasi Balai Benih Ikan
20.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
21.	Program pengembangan perikanan tangkap
21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
21.02.	Pembangunan tempat pelelangan ikan
21.03.	Pemeliharaan rulin/berkala tempat pelelangan ikan
21.04.	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
21.05.	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
21.06.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
22.	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
22.01.	Kajian sistem penyuluhan perikanan
22.02.	Pengembangan Kapasitas Tenaga Penyuluh Perikanan
23.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
23.01.	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
23.02.	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
23.03.	Penyusunan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi perikanan
23.04.	Promosi atas hasil produksi perikanan
23.05.	Operasionalisasi Pasar Ikan Heigentis
23.06.	Peningkatan Sarana dan prasarana hasil Perikanan
24.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
24.01.	Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
25.	Program det.....

Unsur : 2.06. - PERDAGANGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	2
15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
15.01.	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
15.02.	Facilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
15.03.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetretologian daerah
15.05.	Pemeliharaan Rulin/ Berkala Gedung Pasar
15.06.	Pengelolaan dan Penyediaan Sarana prasarana Pasar
15.07.	Perangkitan Pengawasan Barang Kena Cukai

15.08.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
16.	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
16.01.	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa
16.02.	Persebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
16.03.	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional
16.04.	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang
16.05.	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
17.01.	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan industri
17.02.	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
17.03.	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
17.04.	Pengembangan data base informasi potensi unggulan
17.05.	Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional
17.06.	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk
17.07.	Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri
17.08.	Mem bangun jejaring dengan eksportir
17.09.	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait
17.10.	Pengembangan kluster produk ekspor
17.11.	Peningkatan kapasitas lab peng uji mutu barang ekspor dan impor
17.12.	Pembangunan promosi perdagangan internasional
18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
18.01.	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional
18.02.	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
18.03.	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
18.04.	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
18.05.	Pengembangan pasar lelang daerah
18.06.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
18.07.	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
18.08.	Pengembangan Sumber Daya Pasar Tradisional
18.09.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Distribusi
19.	Program Pembinaan pedagang kadi lima dan asongan
19.01.	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
19.02.	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
19.03.	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
19.04.	Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
19.05.	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
19.06.	Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan barang pedagang kakilima dan asongan
20.	Program dtl.....

Unusan : 207. - PERINDUSTRIAN

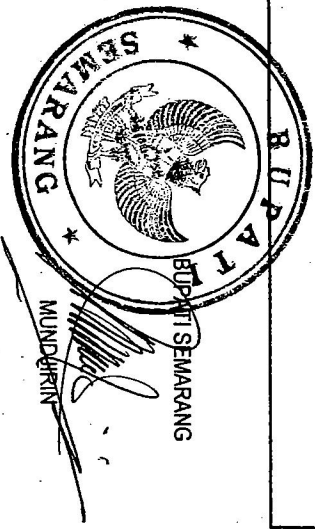
PROGRAM DAN KEGIATAN	
KODE	
1	
15.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

15.01.	Koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi
15.02.	Pelayanan pengembangan modal ventura dan inkubator
15.03.	Pengembangan Infrastruktur kelembagaan standarisasi
15.04.	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
15.05.	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
15.06.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
16.01.	Facilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
16.02.	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
16.03.	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
16.04.	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
16.05.	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah
16.06.	Facilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
16.07.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
17.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
17.01.	Pembinaan kemampuan teknologi industri
17.02.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
17.03.	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
17.04.	Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur
18.	Program Penataan Struktur Industri
18.01.	Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
18.02.	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri
18.03.	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
19.	Program Pengembangan serta-sentra Industri potensial
19.01.	Pembangunan akses transportasi serta-sentra industri potensial
19.02.	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
20.	Program dst.....

Unusan : 208. - TRANSMIGRASI

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
15.01.	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan.
15.02.	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
15.03.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
15.04.	Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi
15.05.	Penggerakan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
16.	Program Transmigrasi Lokal
16.01.	Penyuluhan Transmigrasi Lokal
16.02.	Pelatihan transmigrasi lokal
17.	Program Transmigrasi Regional

17.01.	Penyuluhan transmigrasi regional
17.02.	Pelatihan transmigrasi regional
18.	Program dst..



KODE REKENING BELANJA DAERAH

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.	BELANJA DAERAH
5.1.	Belanja Tidak Langsung
5.1.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10.	Uang Paket 1)
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah 2)
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi 2)
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran 2)
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan 2)
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan 2)
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas 1)
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian 2)
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi guru
5.1.1.01.22.	Tunjangan Pengamanan Persandian
5.1.1.01.23.	Tunjangan Bahaya Radiasi
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negri Sipil Daerah

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Jasa Pelayanan
5.1.1.04.01.	Biaya pemungutan PBB
5.1.1.04.02.	Biaya pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah
5.1.1.05.01.	Belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.02.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.2.	Belanja Bunga
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.2.01.02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01.	Bunga Utang Obligasi
5.1.3.	Belanja Subsidi
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan....
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.4.	Belanja Hibah
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01.	Pemerintah Pusat
5.1.4.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya3)
5.1.4.02.01.	Pemerintah Provinsi....
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa....
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)
5.1.4.04.01.	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN....
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah untuk lembaga Keagamaan (al: IPhI, Pesantren dll)
5.1.4.05.02.	Belanja Hibah untuk Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
5.1.4.06.01.	Kelompok masyarakat/perorangan
5.1.4.07.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta
5.1.4.08.	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal
5.1.4.08.01.	Belanja Hibah Kepada KPUD Kabupaten Semarang
5.1.4.08.02.	Belanja Hibah Kepada Panwaslu Kabupaten Semarang
5.1.4.08.03.	Belanja Hibah Kepada Kodim 0714 Salatiga
5.1.4.09.	Belanja Hibah Dana BOS
5.1.4.09.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5.1.4.09.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat
5.1.5.04.01.	Belanja bantuan kepada Partai Politik
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi ...
5.1.6.01.02.	-----
5.1.6.01.03.	-----
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ...
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...
5.1.6.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...
5.1.7.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01.	PDIP
5.1.7.05.02.	PARTAI GOLKAR
5.1.7.05.03.	PKB
5.1.7.05.04.	PPP
5.1.7.05.05.	PAN
5.1.7.05.06.	PKS
5.1.7.05.07.	PARTAI DEMOKRAT
5.1.7.05.08.	PKPI
5.1.7.05.09.	PARTAI GERINDRA
5.1.7.05.10.	PARTAI HANURA
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.01.	Belanja Langsung
5.2.	Belanja Pegawai
5.2.1.	Honorarium PNS
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Penmiksa dan Pengadaan)
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)
5.2.1.01.04.	Honorarium Khusus Kegiatan Pengawasan (Inspektoral)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Pelaksana Kegiatan
5.2.1.02.04.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.1.03.	Uang Lembur
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04.	Belanja Pegawai BLUD
5.2.1.04.01.	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.1.05.	Honorarium Dana BOS
5.2.1.05.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/ administrasi tender
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.09	Belanja pengisian air minum
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Medis
5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Non Medis
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.	Belanja bibit temak
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06	Belanja bahan Percontohan
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Sembako
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pakan Ternak
5.2.2.02.09	Belanja Piagam/Plata/sertifikat/uang pembinaan
5.2.2.02.10	Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Selensnya
5.2.2.02.11.	Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran, dsj.
5.2.2.02.12.	Belanja Paket Persalinan (Jamkesmas)
5.2.2.02.13.	Belanja Paket Rawat Inap Persalinan (Jamkesmas)
5.2.2.02.14.	Belanja Paket Rawat Inap Non Persalinan (Jamkesmas)
5.2.2.02.15.	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.	Belanja telepon
5.2.2.03.02.	Belanja air
5.2.2.03.03.	Belanja listrik
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimil/Internet
5.2.2.03.07.	Belanja pakev/pengiriman
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi (Uji Tera)
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10.	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11.	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Penguburan Mayat Tak Dikenal
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Restitusi Pajak Daerah
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Pemeriksaan Uji Laboratorium (Obat, Kesehatan dsj)
5.2.2.03.18.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Laundry/Wassery
5.2.2.03.21.	Belanja Nota Persejukan NIP (penerimaan CPNS)
5.2.2.03.22.	Belanja Tes Potensi (PCAP/QAP)
5.2.2.03.23.	Belanja Ujian Dinas
5.2.2.03.24.	Belanja Soal dan Koreksi Tes CPNS
5.2.2.03.25.	Belanja Kontribusi Kenaikan Pangkat
5.2.2.03.26.	Belanja Kontribusi Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.2.2.03.27.	Belanja Kontribusi penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat otomatis
5.2.2.03.28.	Belanja Kontribusi Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
5.2.2.03.29.	Belanja Retribusi Sampah
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Belanja Asuransi JAMSOSTEK
5.2.2.04.04.	Belanja Asuransi Masyarakat Miskin
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Pengunjung Obyek Wisata
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.06.	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.	Belanja cetak
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambah/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator
5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser
5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer
5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Kaset / CD
5.2.2.10.08.	Belanja sewa Tanaman Hias
5.2.2.10.09.	Belanja sewa Pengharum ruangan
5.2.2.10.10.	Belanja sewa Peralatan Makan Prasmanan
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Software, Hardware, dan System
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Sound System
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu
5.2.2.11.04.	Belanja makan dan minum Petugas Piket
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman harian pasien
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5.2.2.16.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5.2.2.16.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5.2.2.16.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi
5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis
5.2.2.17.04.	Belanja Diklat Penjenjangan
5.2.2.17.05.	Belanja Diklat Teknis/Fungsional
5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01.	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5.2.2.18.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5.2.2.19.02.	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5.2.2.19.03.	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung Pertemuan

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Rumah Dinas
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Menara, Prassasi, Tugu Sejarah
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Tak Bermotor
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Buku, Terbitan Berkala, Arsip Daerah
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
5.2.2.20.14.	Biaya Pemeliharaan Alat-alat/Reagent Laboratorium
5.2.2.20.15.	Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persejahtaan
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan (RSU, Dirkes)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultan
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultasi Peneliti
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultasi Pengawas
5.2.2.22.	Belanja Pendidikan dan Pembinaan Non PNS (Anak Didik)
5.2.2.22.01.	Belanja Beasiswa Anak Didik
5.2.2.22.02.	Belanja Pembinaan Non PNS
5.2.2.23.	Belanja Barang yang Kepemilikannya Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat
5.2.2.23.02.	Belanja Kontruksi/ Bangunan
5.2.2.23.05.	Belanja Peralatan
5.2.2.23.06.	Belanja Bahan / Material (al. bahan baku bangunan, bibit tanaman, bibit ternak)
5.2.2.24.	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.24.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD
5.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
5.2.2.25.01.	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.26.	Belanja Barang Yang akan dijual kepada masyarakat/ Pihak Ketiga
5.2.2.26.01.	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat
5.2.2.26.02.	Belanja Barang yang akan dijual kepada Pihak ketiga
5.2.3.	Belanja Modal
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.01.	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.01.03.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.01.04.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.01.05.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.01.06.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.01.07.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.01.08.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.01.09.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.01.10.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.01.11.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial paniti asuhan
5.2.3.01.12.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial paniti jompo
5.2.3.01.13.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.01.14.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.01.15.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.01.16.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
5.2.3.01.17.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.01.18.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.19.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.01.20.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.01.22.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.01.23.	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.01.24.	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
5.2.3.01.25.	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
5.2.3.01.26.	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
5.2.3.01.27.	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
5.2.3.01.28.	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
5.2.3.01.29.	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.01.30.	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan Prasarana Umum
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.01.	Belanja modal Pengadaan traktor
5.2.3.02.02.	Belanja modal Pengadaan bulldozer
5.2.3.02.03.	Belanja modal Pengadaan stoom wals
5.2.3.02.04.	Belanja modal Pengadaan eskavator
5.2.3.02.05.	Belanja modal Pengadaan dump truk
5.2.3.02.06.	Belanja modal Pengadaan crane
5.2.3.02.07.	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.02.08.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.02.09.	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
5.2.3.03.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
5.2.3.03.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
5.2.3.03.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
5.2.3.03.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
5.2.3.03.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
5.2.3.03.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
5.2.3.03.15	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Uji Kendaraan Bermotor
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.02.	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
5.2.3.04.03.	Belanja modal Pengadaan becak
5.2.3.04.04.	Belanja modal Pengadaan sepeda
5.2.3.04.05.	Belanja modal Pengadaan karavan
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.05.01.	Belanja modal Pengadaan kapal motor
5.2.3.05.02.	Belanja modal Pengadaan kapal feri
5.2.3.05.03.	Belanja modal Pengadaan speed boat
5.2.3.05.04.	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
5.2.3.05.05.	Belanja modal Pengadaan hydro foil
5.2.3.05.06.	Belanja modal Pengadaan jet foil
5.2.3.05.07.	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
5.2.3.05.08.	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
5.2.3.05.09.	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.06.01.	Belanja modal Pengadaan perahu layar
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan perahu sampan

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.06.03.	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
5.2.3.06.04.	Belanja modal Pengadaan perahu karet
5.2.3.06.05.	Belanja modal Pengadaan perahu rakit
5.2.3.06.06.	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.07.01.	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
5.2.3.07.02.	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
5.2.3.07.03.	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
5.2.3.07.04.	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
5.2.3.07.05.	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
5.2.3.07.06.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang amphi
5.2.3.07.07.	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Alat Uji
5.2.3.08.01.	Belanja modal Pengadaan mesin las
5.2.3.08.02.	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
5.2.3.08.03.	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
5.2.3.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Uji Kendaraan bermotor
5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan dan Pertukangan
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.2.3.09.01.	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
5.2.3.09.02.	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
5.2.3.09.03.	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
5.2.3.09.04.	Belanja modal Pengadaan alat penetas
5.2.3.09.05	Belanja modal alat-alat pertanian
5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat-alat Peternakan
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.	Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.02.	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.03.	Belanja modal Pengadaan mesin stensil
5.2.3.10.04.	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy, Laminating
5.2.3.10.05.	Belanja modal Pengadaan mesin cetak
5.2.3.10.06.	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
5.2.3.10.07.	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
5.2.3.10.08.	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas, plastik, dsj
5.2.3.10.09.	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.12.	Belanja modal LCD, Proyektor
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor
5.2.3.11.01.	Belanja modal Pengadaan meja gambar
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan brankas
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filing kabinet
5.2.3.11.05.	Belanja modal Pengadaan white board
5.2.3.11.06.	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Diesel, Zenset, Generator, pompa air dsj
5.2.3.11.09.	Belanja modal Tratak, Nursery
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Trails
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book
5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner
5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display
5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaan CPU
5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.09.	Belanja modal kelengkapan komputer (software, flashdisk, mouse, keyboard)
5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.12.11.	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak Komputer
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat
5.2.3.13.03.	Belanja modal Pengadaan meja makan
5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
5.2.3.13.06.	Belanja modal Pengadaan kursi makan
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/v/kembang
5.2.3.13.10.	Belanja modal meja dan kursi tamu, tunggu, sekolahan
5.2.3.13.11.	Belanja modal podium

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan tabung gas
5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan kompor gas
5.2.3.14.03.	Belanja modal Pengadaan lemari makan
5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.06.	Belanja modal Pengadaan rak piring
5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Perhias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Karpet / Wallpaper
5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Korden, Taplak dan sejenisnya
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan telepon
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan radio SSB
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan radio VHF
5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan radio UHF
5.2.3.17.07.	Belanja modal Pengadaan alat sandi
5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Antena
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan timbangan
5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan teodolite
5.2.3.18.03.	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS
5.2.3.18.05.	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
5.2.3.18.06.	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
5.2.3.18.07.	Belanja modal Pengadaan barometer
5.2.3.18.08.	Belanja modal Pengadaan seismograph
5.2.3.18.09.	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.19.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.19.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.19.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.19.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.19.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.3.19.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.19.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.19.10.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.19.11.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran ortopedi
5.2.3.19.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
5.2.3.19.14.	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/intermis
5.2.3.19.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Inventaris Ruang Rawat Inap/Rawat Jalan
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.20.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.20.04.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
5.2.3.20.05.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.20.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.20.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.20.08.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
5.2.3.21.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.21.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.22.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.23.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.23.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Pererangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5.2.3.24.02.	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
5.2.3.24.03.	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Taman dan Hutan Kota
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.02.	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5.2.3.25.03.	Belanja Modal Penambahan Daya / Penurunan daya Listrik
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.26.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.26.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
5.2.3.26.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana dan prasarana umum
5.2.3.26.09.	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan publikasi (reklame, panggung, iklan)
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan buku matematika
5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan buku fisika
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan buku kimia
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan buku biologi
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan buku biografi
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan buku geografi
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.27.10.	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
5.2.3.27.11.	Belanja modal Pengadaan buku sejarah
5.2.3.27.12.	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5.2.3.27.14.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
5.2.3.27.15.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
5.2.3.27.16.	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
5.2.3.27.17.	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
5.2.3.27.18.	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
5.2.3.27.19.	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
5.2.3.27.20.	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
5.2.3.27.21.	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.22.	Belanja modal Pengadaan buku naskah
5.2.3.27.23.	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)
5.2.3.27.24.	Belanja modal Pengadaan mikrofilm
5.2.3.27.25.	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
5.2.3.27.26.	Belanja modal pengadaan alat permainan edukatif
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto
5.2.3.28.02.	Belanja modal Pengadaan patung
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan ukiran
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan pahatan
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan batu alam
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan maket/miniat/diorama
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Alat Kesenian/Musik
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat-alat Olah Raga
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan ternak
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan tanaman
5.2.3.29.04.	Belanja Modal Plasma, Nutra Keanekaragaman Hayati dan Hewan
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseñtatan/Keamanan
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan senjata api
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan radar
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan borgol
5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet

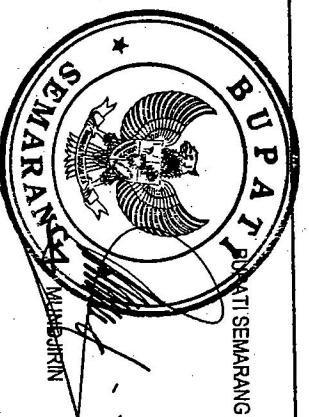
Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan perisai/lameng
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan detektor logam
5.2.3.30.08.	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
5.2.3.30.09.	Belanja modal Pengadaan pertunjukan
5.2.3.30.10.	Belanja modal Pengadaan helm
5.2.3.30.11.	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene
5.2.3.30.12.	Belanja modal Pengadaan sentop/senter
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Rumah Dinas)
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Tempat Tidur
5.2.3.32.	Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan Menengah
5.2.3.32.01.	Belanja Modal Peralatan Industri Sandang
5.2.3.32.02.	Belanja Modal Peralatan Industri Makanan Olahan
5.2.3.32.03.	Belanja Modal Peralatan Industri Kerajinan
5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan
5.2.3.33.01.	Belanja modal pengadaan fasilitas perlengkapan jalan
5.2.3.34.	Belanja Modal BLUD
5.2.3.34.01.	Belanja Modal BLUD RSUD
5.2.3.35.	Belanja Modal BOS
5.2.3.35.01.	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.36.	Belanja Modal Pemeliharaan Tanah
5.2.3.36.01.	Belanja modal Pemeliharaan tanah kantor
5.2.3.36.02.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
5.2.3.36.03.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan puskesmas
5.2.3.36.04.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana kesehatan poliklinik
5.2.3.36.05.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
5.2.3.36.06.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
5.2.3.36.07.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
5.2.3.36.08.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
5.2.3.36.09.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
5.2.3.36.10.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
5.2.3.36.11.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana sosial pariti asuhan
5.2.3.36.12.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana sosial pariti jompo
5.2.3.36.13.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum terminal
5.2.3.36.14.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum dermaga
5.2.3.36.15.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
5.2.3.36.16.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum rumah potong hewan

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.36.17.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
5.2.3.36.18.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.36.19.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
5.2.3.36.20.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum taman
5.2.3.36.21.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
5.2.3.36.22.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana umum ibadah
5.2.3.36.23.	Belanja modal Pemeliharaan tanah sarana stadion olahraga
5.2.3.36.24.	Belanja modal Pemeliharaan tanah perumahan
5.2.3.36.25.	Belanja modal Pemeliharaan tanah pertanian
5.2.3.36.26.	Belanja modal Pemeliharaan tanah perkebunan
5.2.3.36.27.	Belanja modal Pemeliharaan tanah perikanan
5.2.3.36.28.	Belanja modal Pemeliharaan tanah peternakan
5.2.3.36.29.	Belanja modal Pemeliharaan tanah perkampungan
5.2.3.36.30.	Belanja modal Pemeliharaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
5.2.3.36.31.	Belanja modal Pemeliharaan tanah Untuk Sarana & Prasarana umum
5.2.3.37.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Berat
5.2.3.37.01.	Belanja modal Pemeliharaan traktor
5.2.3.37.02.	Belanja modal Pemeliharaan bulldozer
5.2.3.37.03.	Belanja modal Pemeliharaan stoom wals
5.2.3.37.04.	Belanja modal Pemeliharaan eskavator
5.2.3.37.05.	Belanja modal Pemeliharaan dump truk
5.2.3.37.06.	Belanja modal Pemeliharaan crane
5.2.3.37.07.	Belanja modal Pemeliharaan kendaraan penyapu jalan
5.2.3.37.08.	Belanja modal Pemeliharaan mesin pengolah semen
5.2.3.37.09.	Belanja modal Pemeliharaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
5.2.3.38.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.38.02.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.38.03.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
5.2.3.38.04.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
5.2.3.38.05.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Udara
5.2.3.39.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Bengkel, alat uji dan Alat Ukur
5.2.3.39.01.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Bengkel
5.2.3.39.02.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat uji
5.2.3.39.03.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Ukur
5.2.3.40.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.40.01.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Pengolahan Pertanian
5.2.3.40.02.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Pengolahan Peternakan
5.2.3.41.	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan/ perlengkapan Kantor dan rumah tangga
5.2.3.41.01.	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor
5.2.3.41.02.	Belanja Modal Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.41.03.	Belanja Modal Pemeliharaan meubelair
5.2.3.41.04.	Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan rumah tangga
5.2.3.42.	Belanja Modal Pemeliharaan Komputer
5.2.3.42.01.	Belanja modal Pemeliharaan komputer mainframe/server
5.2.3.42.02.	Belanja modal Pemeliharaan komputer/PC
5.2.3.42.03.	Belanja modal Pemeliharaan komputer note book
5.2.3.42.04.	Belanja modal Pemeliharaan printer
5.2.3.42.05.	Belanja modal Pemeliharaan scanner
5.2.3.42.06.	Belanja modal Pemeliharaan monitor/display
5.2.3.42.07.	Belanja modal Pemeliharaan CPU
5.2.3.42.08.	Belanja modal Pemeliharaan UPS/stabilizer
5.2.3.42.09.	Belanja modal Pemeliharaan perlengkapan komputer (Software, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
5.2.3.42.10.	Belanja modal Pemeliharaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.43.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.43.01.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Studio
5.2.3.43.02.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.44.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
5.2.3.44.01.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran umum
5.2.3.44.02.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran gigi
5.2.3.44.03.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran THT
5.2.3.44.04.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran mata
5.2.3.44.05.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran bedah
5.2.3.44.06.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran anak
5.2.3.44.07.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
5.2.3.44.08.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
5.2.3.44.09.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran kardiologi
5.2.3.44.10.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran neurologi
5.2.3.44.11.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran ortopedi
5.2.3.44.12.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat kedokteran hewan
5.2.3.44.13.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat farmasi
5.2.3.44.14.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat penyakit dalam/intermis

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.44.15.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat Kesehatan
5.2.3.44.16.	Belanja Modal Pemeliharaan Inventaris Ruang Rawat Inap / Rawat jalan
5.2.3.45.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.45.01.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium biologi
5.2.3.45.02.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
5.2.3.45.03.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium kimia
5.2.3.45.04.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium pertanian
5.2.3.45.05.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium peternakan
5.2.3.45.06.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium perkebunan
5.2.3.45.07.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium perikanan
5.2.3.45.08.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat laboratorium bahasa
5.2.3.45.09.	Belanja modal Pemeliharaan alat-alat peraga / praktik sekolah
5.2.3.46.	Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan
5.2.3.46.01.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan
5.2.3.46.02.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan fly over
5.2.3.46.03.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jalan under pass
5.2.3.47.	Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jembatan
5.2.3.47.01.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan gantung
5.2.3.47.02.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan ponton
5.2.3.47.03.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
5.2.3.47.04.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
5.2.3.48.	Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air
5.2.3.48.01.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi bendungan
5.2.3.48.02.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi waduk
5.2.3.48.03.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal permukaan
5.2.3.48.04.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal bawah tanah
5.2.3.48.05.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi
5.2.3.48.06.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
5.2.3.48.07.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi reservoir
5.2.3.48.08.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi pintu air
5.2.3.49.	Belanja Modal Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pemeliharaan lampu hias jalan
5.2.3.49.02.	Belanja modal Pemeliharaan lampu hias taman
5.2.3.49.03.	Belanja modal Pemeliharaan lampu penerang hutan kota
5.2.3.49.04.	Belanja modal Pemeliharaan Taman dan Hutan Kota
5.2.3.50.	Belanja Modal Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.50.01.	Belanja modal Pemeliharaan instalasi listrik

Kode Rekening	Uraian
1	2
5.2.3.50.02.	Belanja modal Pemeliharaan instalasi telepon
5.2.3.51.	Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.51.01.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.51.02.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
5.2.3.51.03.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.51.04.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian gedung gudang
5.2.3.51.05.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
5.2.3.51.06.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
5.2.3.51.07.	Belanja modal Pemeliharaan konstruksi tugu peringatan
5.2.3.51.08.	Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Sarana dan Prasarana Umum
5.2.3.51.09.	Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan Publikasi (Reklame, Panggung, Iklan dsj)
5.2.3.52.	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Persenjaataan/Keamamanan
5.2.3.52.01.	Belanja modal Pemeliharaan senjata api
5.2.3.52.02.	Belanja modal Pemeliharaan Persenjaataan non senjata Api
5.2.3.52.03.	Belanja modal Pemeliharaan Alat-alat keamamanan
5.2.3.53.	Belanja Modal Peralatan Industri Kecil dan Menengah
5.2.3.53.01.	Belanja Modal Peralatan Industri Sandang
5.2.3.53.02.	Belana Modal Peralatan Industri Makanan Olahan
5.2.3.53.03.	Belanja Modal Peralatan Industri Kerajinan
5.2.3.54.	Belanja Modal Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan
5.2.3.54.01.	Belanja modal Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan
5.2.3.55.	Belanja Modal Pemeliharaan BLUD
5.2.3.55.01.	Belanja Modal Pemeliharaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah




KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

Kode Rekening	Urutan
1	2
6.	PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04.	Lain-lain PAD yang sah
6.1.1.02.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01.	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.1.1.03.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6.1.1.03.01.	Pendapatan Hibah
6.1.1.03.02.	Dana Darurat
6.1.1.03.03.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
6.1.1.03.04.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
6.1.1.03.05.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04.	Belanja Modal
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga
6.1.1.04.06.	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09.	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11.	Belanja Tidak Terduga
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
6.1.1.05.01.	Uang jaminan
6.1.1.05.02.	Potongan Taspen
6.1.1.05.03.	Potongan Beras
6.1.1.05.04.	Askes
6.1.1.06.	Kegiatan lanjutan
6.1.1.06.01.	Kegiatan lanjutan


Kode Rekening	Uraian
1	2
6.1.1.07.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01.	Pencairan Dana Cadangan nomor
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.3.01.	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
6.1.3.01.01.	BUMD
6.1.3.02.	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
6.1.3.02.01.	Badan.....
6.1.3.02.02.	Masyarakat Petani/Peternak/Pedagang
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
6.1.4.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6.1.4.01.01.	Penerusan pinjaman.....
6.1.4.02.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.4.02.01.	Pemerintah daerah
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.4.03.01.	Bank
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.04.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.4.05.	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
6.1.4.05.01.	Obligasi atas nama..
6.1.4.05.02.	obligasi nomor.....
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6.1.5.01.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah
6.1.6.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
6.1.6.01.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
6.1.6.01.02.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
6.1.6.01.03.	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
6.1.6.02.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.02.01.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
6.1.6.03.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
6.1.6.03.01.	Pemerintah daerah
6.1.6.04.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
6.1.6.04.01.	Bank
6.1.6.05.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
6.1.6.05.01.	Lembaga keuangan bukan bank
6.1.7.	Penerimaan Dana Talangan

Kode Rekening	Uraian
1	2
6.1.7.01.	Penerimaan Dana Talangan Dari Propinsi
6.1.7.01.01.	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan
6.1.7.02.	Penerimaan Kembali Dana Talangan
6.1.7.02.01.	Penerimaan Kembali Dana Talangan Pengadaan Pangan
6.1.8.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.8.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
6.1.8.01.01.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Dari Kelompok Masyarakat
6.2.	Pengeluaran Pembayaan Daerah
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan nomor...
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2.2.01.	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
6.2.2.01.01.	BUMN
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)
6.2.2.02.01.	BUMD
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta
6.2.2.03.01.	Badan ...
6.2.2.03.02.	Masyarakat Petani/Peternak/Pedagang
6.2.2.04.	Penyaluran Dana Bergulir
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman
6.2.3.01.02.	Rekening Dana Investasi (RDI)
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain
6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
6.2.3.03.01.	Bank
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman...
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.3.06.01.	Pemerintah daerah....
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank

Kode Rekening	Uraian
1	2
6.2.3.07.01.	Bank
6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Uang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank...
6.2.3.09.	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo
6.2.3.09.01.	Obligasi atas nama
6.2.3.09.02.	Obligasi nomor
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
6.2.3.10.01.	Obligasi atas nama
6.2.3.10.02.	Obligasi nomor
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
6.2.4.01.01.	Pemerintah
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain
6.2.4.02.01.	Pemerintah daerah
6.2.5.	Pengeluaran Dana Talangan
6.2.5.01.	Pengembalian Dana Talangan Ke Propinsi
6.2.5.01.01.	Pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan
6.2.5.02.	Pemberian Dana Talangan
6.2.5.02.01.	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan
6.3.	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berkenaan
8.	Rekening Koran Antar Unit
8.1	RK BUD
8.1.1.	RK BUD terhadap Bendahara Penerimaan SKPD
8.1.2.	RK BUD terhadap Bendahara Pengeluaran SKPD
8.1.3.	RK BUD terhadap Pengurus Barang SKPD
8.2	RK SKPD
8.2.1.	RK Bendahara Penerimaan SKPD terhadap BUD
8.2.2.	RK Bendahara Pengeluaran SKPD terhadap BUD
8.2.3.	RK Pengurus Barang SKPD terhadap BUD



 BUPATI SEMARANG



 M. MUNDJIRIN